

**Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Konservatisme
Akuntansi dan Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap
Tindakan Agresivitas Pajak**

**(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI
Periode 2012-2016)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Rafani Adhyapaka Shafira

No. Mahasiswa: 14312385

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Konservatisme Akuntansi dan Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak
(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjan Strata- 1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Rafani Adhyapaka Shafira

No. Mahasiswa : 14312385

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 15 Mei 2018

Penulis,



(Rafani Adhyapaka Shafira)

Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Konservatisme Akuntansi dan Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak
(Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

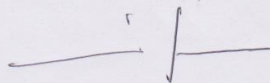
Nama : Rafani Adhyapaka Shafira

No. Mahasiswa : 14312385

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 9 Mei 2018

Dosen Pembimbing,



(Hadri Kusuma Prof. Dr., MBA.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, KONSERVATISME
AKUNTANSI, DAN AGRESIVITAS PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP
AGRESIVITAS PAJAK**

Disusun Oleh : **RAFANI ADHYAPAKA SHAFIRA**

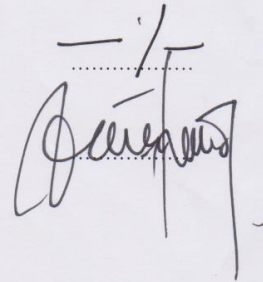
Nomor Mahasiswa : **14312385**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

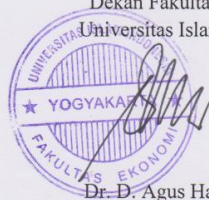
Pada hari Selasa, tanggal: 5 Juni 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Hadri Kusuma, Prof., Dr., MBA.

Penguji : Sigit Handoyo, SE., M.Bus



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, rezeki, serta karunia-Nya. Semoga shalawat dan keselamatan selalu tercurah kepada nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Konservatisme Akuntansi dan Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S-1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kenikmatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih dan syukur *Alhamdulillah* tak henti-hentinya atas barokah dan rahmat yang Engkau berikan.
2. Nabi Muhammad SAW, senantiasa memberikan syafaat dan suritauladan bagi penulis hingga shalawat dan salam senantiasa terlantun.
3. Bapak Muh. Rofi dan Ibu Ida Meinani Sadarsih tersayang selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan kesabaran

dalam menempuh pendidikan Sarjana ini. Tiada hentinya penulis ucapkan terimakasih banyak atas doa, nasihat dan kasih sayangnya dalam menjadikan penulis anak yang sholeha, mencintai, dan saling menghormati satu sama lain.

4. Mahendra Aulia Rakhman, selaku adik kandung tersayang, terima kasih atas dukungan kepada penulis untuk terus berusaha, serta terima kasih untuk Mbak Ica, Mbak Ama dan Mbak Vherika selaku sepupu tecinta yang setiap saat memberikan motivasi dan semangat bagi penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih banyak atas waktunya karena telah memberikan nasihat dan ilmu yang sangat berguna bagi penulis. Terima kasih telah mengajarkan arti kedisiplinan, kesabaran dan pengarahan bagi penulis untuk terus maju dan berusaha selam mengerjakan skripsi ini. Semoga pelajaran-pelajaran yang telah bapak berikan dapat menjadi ladang pahala dan mendapat Ridho dari Allah SWT.
6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran universitas.
7. Bapak Dr. Dwiprpto Agus Harjito, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajaran pengajar program studi Akuntansi atas segala ilmu yang telah diberikan.

9. Laela Musdawati, Nanda Cindy Larasati P, Gina Wahyu Murniana, Ulfa Fajria Ayub, Dina Artika Andeswari dan Hanief Nur Fajriati selaku sahabat-sahabat “Akhwat Tangguh” penulis, terima kasih sudah memberikan makna, motivasi, dan cerita lika – liku selama penulis menempuh dunia perkuliahan. Semoga Allah SWT menjaga tali persaudaraan kita semua dan selalu memberikan kelancaran dan kesuksesan karena semua akan indah pada waktunya.
10. Linda Purwati dan Anita Surya Mulyanti, selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan masukan dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas motivasi kalian agar selalu bersyukur dan mendekatkan diri kepadaNya. Tetap berjuang yaa, *see you on top!*
11. Amalia, Milla, dan Karima selaku sahabat baik penulis yang sama-sama berjuang dari awal kuliah hingga sekarang. Terima kasih dan tetap berjuang.
12. Vita, Mufida, Early, Andis, Susi, Opik, Silvia dan Ikrima selaku sahabat-sahabat baik penulis dari SMP dan SMA yang hingga sekarang tetap menjadi pendengar dan sabar menghadapi keluh kesah penulis. Terima kasih sahabat dunia dan akhiratku, semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT.
13. Immelita Budiarti dan Laela Musdawati selaku sahabat seperjuangan bimbingan skripsi penulis. Terima kasih telah membantu dan menasihati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dapat bermanfaat dalam kehidupan kita.

14. Seluruh keluarga besar pengurus Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ekonomika 2016-2018, terkhusus divisi Riset dan Pengembangan Pustaka yang selalu memberikan keceriaan dan semangat. Terima kasih telah mengajarkan arti kerjasama, kebersamaan dan tanggung jawab dan pengalaman berharga kepada penulis. Semoga kita tetap terjalin tali silaturahmi. Sukses untuk kita semua!

15. Putri, Tita, Mas Eko, Mas Indra, Bella, Bayu, Okza dan Migut selaku teman-teman KKN unit 164, terima kasih sudah memberikan warna dalam kehidupan penulis selama satu bulan. Semoga sehat selalu dan dalam lindungannya.

16. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT, selalu melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala hal. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Yogyakarta, 15 Mei 2018

Penulis,

(Rafani Adhyapaka Shafira)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Skripsi	Error! Bookmark not defined.
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran	xv
Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Literature Review.....	13
2.2 Kajian Teori	35
2.2.1 Teori Agensi.....	35
2.2.2 Teori Stakeholder.....	36
2.2.3 Teori Akuntansi Positif.....	39
2.2.4 Pajak.....	39
2.2.5 Agresivitas Pajak	40
2.3 Good Corporate Governance.....	41
2.3.1 Manfaat Good Corporate Governance	43
2.4 Konservatisme Akuntansi	46
2.5 Agresivitas Pelaporan Keuangan	47

2.6	Kerangka Pemikiran.....	49
2.7	Pengembangan Hipotesis	49
2.7.1	Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	49
2.7.2	Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	51
2.7.3	Pengaruh Komite Audit Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	53
2.7.4	Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak.....	55
2.7.5	Pengaruh Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	56
BAB III METODE PENELITIAN		59
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian	59
3.2	Jenis dan Sumber Data	60
3.3	Variabel dan Pengukuran Variabel	60
3.3.1	Variabel Dependen.....	60
3.3.2	Variabel Independen	61
3.3.3	Variabel Kontrol	64
3.3.3.1	Profitabilitas	64
3.4	Alat Statistik.....	65
3.4.1	Metode Analisis Data.....	65
3.4.2	Uji Statistik Hipotesa	65
3.4.3	Hipotesa Operasional	66
BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN.....		68
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	68
4.2	Statistika Deskriptif.....	69
4.3	Analisis Korelasi	72
4.4	Pengujian Hipotesis.....	74
4.5	Pembahasan.....	74
4.5.1	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	74
4.5.1.1	Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	75

4.5.1.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	77
4.5.1.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak ..	79
4.5.2 Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	81
4.5.3 Pengaruh Agresivitas Pelaporan Keuangan terhadap Tindakan Agresivitas Pajak	83
BAB V PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Implikasi Penelitian.....	87
5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Seleksi Sampel Berdasarkan Metode <i>Purposive Sampling</i>	68
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif	69
Tabel 4.3 Hasil Uji Korelasi.....	72
Tabel 4.4 Hasil <i>Generalized Linear Model</i>	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	49
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Sampel Perusahaan Perbankan.....	94
Lampiran 2 : Data Agresivitas Pajak 2012-2016	95
Lampiran 3 : Data Kepemilikan Manajerial 2012-2016	96
Lampiran 4 : Data Komisaris Independen 2012-2016	97
Lampiran 5 : Data Komite Audit 2012-2016	98
Lampiran 6 : Data Konservatisme Akuntansi 2012-2016.....	99
Lampiran 7 : Data Agresivitas Pelaporan Keuangan 2012-2016.....	100
Lampiran 8 : Data Profitabilitas 2012-2016.....	101
Lampiran 9 : Hasil <i>Generalized Linear Model</i>	102

ABSTRAK

Agresivitas pajak adalah tindakan penghindaran pembayaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan menggunakan celah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan, konservatisme akuntansi dan agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah berasal dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Teknik pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling* dengan jenis data sekunder yang menghasilkan sampel sebanyak 33 bank. Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis *Generalized Linear Model*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan tiga proksi yaitu kepemilikan manajerial dan Komite audit secara positif signifikan berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak, namun komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Variabel konservatisme akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak, sedangkan variabel agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.

Kata Kunci : Tata Kelola Perusahaan, Konservatisme Akuntansi, Agresivitas Pelaporan Keuangan, Agresivitas Pajak

ABSTRACT

Tax Aggressiveness is the act of tax evasion from the payment of tax to reduce the tax company with use a crack law. This research aims to analyze the influence of corporate governance, accounting conservatism and aggressiveness of financial reporting toward tax aggressiveness. The population of this research are from bank listed in the Indonesian Stock Exchange which of the period 2012-2016. The sampling technique collection is purposive sampling method with using secondary data that produces sample of 33 banks. The method of analysis data using descriptive statistical analysis and generalized linear model analysis. The results of this research show that corporate governance proxied with three proxy namely ownership managerial and audit committee have positive significant affect toward the act of tax aggressiveness, but independent commissioner has not affect toward the act of tax aggressiveness. Variable of accounting conservatism has positive affect significantly toward the act of tax aggressiveness, while aggressiveness of financial reporting has negative significant affect toward the act of tax aggressiveness.

Keywords : *corporate governance, accounting conservatism, aggressiveness of financial reporting, tax aggressiveness*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan menjadi perhatian utama di Indonesia. Pajak merupakan bagian terpenting dalam sumber pendapatan Negara. Pajak digunakan pemerintah dalam mendanai pembangunan Negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seperti yang dilansir dalam www.databoks.katadata.co.id (2016), dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.750,3 triliun. Dari angka tersebut, pendapatan pemerintah masih mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunan dan gaji pegawai. Sebesar 85,6 persen atau Rp 1.498 triliun anggaran pendapatan negara berasal dari pajak. Sekitar 14,3 persen atau sekitar Rp 250 triliun berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan 0,1 persen atau sekitar Rp 1,4 triliun berasal dari hibah. Oleh karena itu pajak menjadi sumber pendapatan yang besar di negara ini, maka pungutannya pun juga diatur oleh Undang-undang. Berdasar Undang-Undang perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, dalam pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Kementerian Keuangan (2017), realisasi penerimaan pajak sementara mencapai Rp 1.147 triliun atau 89,4 persen dari target Rp 1.283

triliun ditahun 2017. Penerimaan perpajakan tumbuh 4,3 persen dibanding 2016. Dari catatannya, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak berturut-turut adalah 6,92 persen di 2014, 8 persen di 2015, 4,26 peren di 2016 dan 3,75 persen di 2017. Meski penerimaan pajak mengalami kenaikan namun nyatanya kenaikannya belum mampu menyukupi kebutuhan APBN. Hal tersebut terjadi karena adanya pemungutan pajak yang agresif, seperti yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo melalui www.liputan6.com (2018) yaitu di tengah kondisi perekonomian yang belum menggembirakan dan masih dalam fase pemulihan, pemungutan pajak yang agresif yang dipaksakan justru akan mengganggu perekonomian.

Reformasi pajak kerap dilakukan oleh pemerintah guna memperbaiki dan meningkatkan sistem perpajakan di Indonesia. Misal kan saja, bagi para pelaku usaha yang disebut sebagai wajib pajak badan akan mendapatkan potongan tarif sebesar ketentuan yang telah berlaku di dalam PP No. 36 tahun 2017, pasal 4 ayat (1), potongan tarif yang dimaksud sebesar 25%. Potongan tersebut dapat digunakan sebagai motif dari pemerintah untuk mengefisienkan sistem perpajakan agar lebih netral, sederhana, dan memberikan kepastian hukum serta transparansi. Maka dari itu selain untuk meningkatkan pendapatan negara hal ini dirancang agar tidak melakukan penghindaran pajak secara agresif.

Dalam perkembangannya kementerian keuangan juga mengatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak di Indonesia adalah dikarenakan rendahnya kepatuhan penyampaian pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Salah

satu tindakan yang dilakukan ialah Wajib Pajak badan tidak dapat membayar pajak karena pengurangan laba yang didapatkan untuk pembayaran pajaknya terlalu tinggi sehingga keuntungan yang diperoleh semakin meningkat. Dilansir melalui www.pajak.go.id (2016), hal lain yang menjadikan pertimbangan ialah selama ini masih menggunakan prosedur manual dalam melakukan pemungutan pajak maka akan memakan waktu yang cukup lama sehingga banyak para pemeriksa pajak mendapatkan kendala dalam memperoleh informasi, sebagai contoh dalam data pada perusahaan perbankan. Keadaan seperti ini merupakan informasi yang asimetris sehingga memunculkan *moral hazard* bagi pihak Wajib Pajak perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak termasuk salah satunya adalah tindakan agresivitas pajak yang dapat menyebabkan citra negatif di mata masyarakat, karena tindakan tersebut dipandang sebagai kegiatan yang tidak bertanggung jawab dan tidak sah. Agresivitas pajak merupakan strategi yang masih berada didalam *grey area* sehingga menarik dilakukan oleh manajemen karena mampu mencapai tujuan perusahaan dan pemerintah secara bersamaan (Rusydi dan Martani, 2014). Berbagai faktor telah diteliti untuk mengetahui penyebab penghindaran pajak. Menurut Baharudin dan Provita (2011): “Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU atau *Generally Accepted Accounting Principles*, memberikan fleksibilitas bagi pihak manajemen dalam menentukan metode maupun estimasi akuntansi yang dapat digunakan”. Fleksibilitas tersebut akan mempengaruhi perilaku manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan (Kurniaty 2016).

Adapun factor-faktor yang secara umum dapat berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak diantaranya adalah adanya faktor tata kelola perusahaan, faktor konservatisme akuntansi, faktor agresivitas pelaporan keuangan, faktor likuiditas dan leverage, faktor kepemilikan kas, faktor *Corporate Social Responsibility* (CSR), faktor kepemilikan independen, faktor komite audit, faktor dewan komisaris independen, serta faktor profitabilitas. Faktor-faktor tersebut sudah dapat dibuktikan terhadap tindakan agresivitas pajak melalui peneliti-peneliti dalam negeri maupun luar negeri, diantaranya ialah Mangoting & Hadi (2014), Tiaras and Wijaya (2015), Abdullah (2016), Hanna and Haryanto (2016), Kurniaty (2016), Yunistiyani dan Tahar (2016), Wijayanti and Rismawati (2016), serta Novitasari, Vince, dan Silfi (2017). Lanis and Richardson (2013), Boussaidi (2015), Wang (2015), Tarigan et al. (2016) dan Lanis et al. (2017).

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang konsisten, seperti variabel manajemen laba dalam penelitian Novitasari, Vince, dan Silfi (2017), variabel kepemilikan institusional dalam penelitian Hanna and Haryanto (2016) dan Novitasari, Vince, and Silfi (2017), variable intensitas modal dalam penelitian Novitasari, Vince, and Silfi (2017), variable kepemilikan keluarga dalam penelitian Hanna and Haryanto (2016), kemudian variable corporate social responsibility dalam penelitian Tarigan et al. (2016), Yunistiyani dan Tahar, (2016) dan Wijayanti and Rismawati (2016), variable leverage dan likuiditas yang dilakukan oleh Tiaras and Wijaya (2015) dan Wijayanti and Rismawati (2016), variable profitabilitas yang dilakukan oleh Tarigan et al. (2016), dan Wijayanti and Rismawati (2016), variable kepemilikan kas dalam penelitian Wang (2015). Hasil-hasil tersebut terbukti

secara signifikan mempengaruhi agresivitas pajak. Kemudian variable konservatisme akuntansi oleh Kurniaty (2016) yang menyatakan negatif signifikan dalam mempengaruhi agresivitas pajak.

Namun penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten beberapa diantaranya ialah variabel kepemilikan manajerial dalam penelitian Boussaidi (2015) menyatakan bahwa mempunyai hubungan positif signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan menurut Novitasari, Vince, and Silfi (2017) hal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kemudian variabel komisaris independen dalam penelitian Tiaras and Wijaya (2015), Yunistiyani dan Tahar (2016) dan Abdullah (2016) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, namun lain halnya dengan penelitian Novitasari, Vince, and Silfi (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya variable komite audit dalam penelitian Abdullah (2016) dan Hanna and Haryanto (2016) yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, Sedangkan menurut Yunistiyani dan Tahar (2016) dan Novitasari, Vince, and Silfi (2017) komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Terakhir adalah variable agresivitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Hanna and Haryanto (2016) yang menyatakan bahwa agresivitas pelaporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan menurut Yunistiyani dan Tahar (2016) agresivitas pelaporan keuangan dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut dapat dikatakan tidak konsisten karena beberapa penelitian ada yang mendukung dan tidak mendukung factor yang menjadi

pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selain variabel - variable yang tidak konsisten, dalam penelitian sebelumnya juga terdapat beberapa kelemahan, diantaranya ialah Tindakan agresivitas pajak dalam penelitian Kurniaty (2016) tidak dipengaruhi oleh ROA (*Return On Asset*), dikarenakan kenaikan dan penurunan laba dan total aset lebih yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti krisis ekonomi global dan peningaktan inflasi serta kondisi politik negara. kelemahan lainnya juga terdapat dalam penelitian Hanna and Haryanto (2016) yaitu penelitian tidak membedakan sektor penelitian agresivitas pajak tersebut berdasarkan industry lain sehingga tidak dapat digeneralisir. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih membedakan penelitian berdasarkan industri lain seperti perusahaan perbankan dan keuangan untuk mendapatkan hasil yang dapat digeneralisir. Kemudian kelemahan dalam penelitian Luke dan Zulaikha (2016) serta Yunistiyani dan Tahar (2016) adalah tingkat agresivitas pajak perusahaan hanya diukur melalui data yang tersedia dalam laporan keuangan, tidak dapat melalui SPT karena data SPT bersifat privat dan tidak tersedia, sehingga dalam Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lain agar mengembangkan faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Menurut Hanna and Haryanto (2016) untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pengukuran agresivitas pelaporan keuangan dengan pendekatan lainnya, selain dengan proksi diskresi akrual, yang didapatkan sebagai residu dari regresi besaran pendapatan akrual.

Berdasarkan pada ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mengenai agresivitas pajak seperti yang sudah diuraikan diatas, Kurniaty (2016)

menyarankan untuk menggunakan variabel kontrol selain ROA (*return on asset*), misal seperti penggunaan ROE (*return on equity*) karena ROA dapat mengakibatkan nilai bias pada signifikansi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian Mangoting & Hadi (2014) menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan variabel independen lain, seperti variabel struktur kepemilikan dengan mendefinisikan struktur kepemilikan keluarga, sehingga dapat lebih diperjelaskan apakah struktur kepemilikan keluarga melakukan agresivitas pajak.

Penelitian Kurniaty (2016) juga menyarankan untuk menambahkan proksi lain dalam mengukur tindakan agresivitas pajak seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR), *Book Tax Different* (BTD) dan *Net Profit Margin* (NPM). Kemudian, untuk penggunaan variabel struktur kepemilikan, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel kepemilikan keluarga dan kepemilikan pemerintah. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan simulasi terhadap variabel lain seperti ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kompensasi rugi fiskal, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih kokoh dan konsisten terhadap tindakan agresivitas pajak. Kemudian menggunakan sector lain keuangan dan perbankan yang lebih mementingkan kualitas laba, atau dengan menggunakan proksi lain seperti ROE. Saran lain yang diberikan oleh Hanna and Haryanto (2016) ialah menggunakan proksi lain dalam pengukuran agresivitas pajak seperti mempertimbangkan book-tax difference dan menggunakan pengukuran agresivitas pelaporan keuangan dengan pendekatan lainnya. Kemudian saran berikutnya berasal dari Nurjannah (2017) mengatakan bahwa Sampel dalam penelitiannya

hanya terfokus pada perusahaan perbankan serta disarankan untuk memperpanjang periode penelitian .

Pembaharuan dalam penelitian ini akan menjawab saran yang diberikan oleh Kurniaty (2016) dan Hanna and Haryanto (2016) untuk menggunakan sektor perusahaan perbankan sebagai objek penelitian, dengan alasan agar lebih mementingkan kualitas laba pada perusahaan. Selain itu perusahaan perbankan acap kali menjadi sorotan dalam kasus penghindaran pajak secara agresif seperti yang dijelaskan Ah Maftuchan selaku Peneliti Kebijakan Publik dari Perkumpulan Prakarsa (www.bisnis.tempo.co), sektor perbankan dinilai sebagai lembaga keuangan yang mengemplang pajak cukup besar. Sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 10-12 triliun. Modus yang digunakan pengelola bank dalam penghindaran pajak adalah dengan metode pajak agresif, yang menghindari pajak badan dengan memasukan belanja yang tidak masuk akal sehingga seolah-olah perusahaannya merugi.

Dalam penelitian ini yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini akan berfokus pada variable dalam yang tidak konsisten seperti pengaruh kepemilikan manajerial dalam penelitian Boussaidi (2015), Novitasari, Vince, and Silfi (2017), variabel komisaris independen dalam penelitian Tiaras and Wijaya (2015), Yunistiyani dan Tahar (2016), Novitasari, Vince, and Silfi (2017) dan Abdullah (2016), variable komite audit dalam penelitian Abdullah (2016), Hanna and Haryanto (2016), Yunistiyani dan Tahar (2016), dan Novitasari, Vince, and Silfi (2017), variable agresivitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Hanna and Haryanto (2016) dan Yunistiyani dan Tahar (2016).

Pembaharuan selajutnya dalam penelitian ini adalah penulis akan menjawab saran dari Hanna and Haryanto (2016) yang menyarankan untuk menggunakan pengukuran variabel agresivitas pelaporan keuangan dengan pendekatan lain. Kemudian menambahkan variabel konservatisme akuntansi sebagai variabel baru yang dikembangkan dalam penelitian ini karena Mangoting & Hadi (2014) menyarankan untuk menambahkan variabel independen lain dalam mengembangkan faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menggunakan saran dari penelitian Kurniaty (2016) serta Hanna and Haryanto (2016), yang menyarankan untuk menggunakan proksi lain dalam mengukur tindakan agresivitas pajak yaitu dengan pengukuran *Book Tax Different* (BTD), selain dengan menggunakan ETR, karena ETR dianggap hanya membagi total pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak, dan pajak di Indonesia peneanaan PPh untuk Badan dengan tarif efektif dan bersifat pasti (Dewi dan dewi, 2017). Selanjutnya, pembaharuan dalam penelitian ini adalah menggunakan saran yang diberikan oleh penelitian Kurniaty (2016) untuk menambahkan variabel kontrol dengan menggunakan proksi *return on equity* (ROE). Penelitian ini juga akan menambahkan periode penelitian dengan jangka waktu 5 tahun berdasarkan saran yang diberikan oleh Nurjannah (2017) serta Mangoting & Hadi (2014). Sesuai dengan apa yang telah diuraikan diatas mengenai sektor atau industri perbankan dengan alasan untuk memberikan kualitas peningkatan laba, maka pembaharuan dalam penelitian ini juga akan menggunakan sektor atau industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini digunakan guna menjawab saran yang diberikan oleh penelitian Kurniaty (2016)

serta Hanna and Haryanto (2016). Berdasarkan uraian kelemahan dan saran diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Konservatisme Akuntansi dan Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Tindakan Agresivitasn Pajak (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diungkapkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
2. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
3. Apakah agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dibahas ialah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tindakan agresivitas pajak.
2. Menganalisis pengaruh konservatisme akuntansi terhadap tindakan agresivitas pajak.
3. Menganalisis pengaruh agresivitas pelaporan keuangan terhadap tindakan agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pengetahuan bagi para peneliti maupun pembaca yang berkaitan dengan pengaruh kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen yang dikembangkan dari penelitian Boussaidi (2015), Tiaras and Wijaya (2015), Yunistiyani dan Tahar (2016), Abdullah (2016), Novitasari, dan Vince, and Silfi (2017), kemudian konservatisme akuntansi yang dikembangkan dari penelitian Kurniaty (2016) dan agresivitas pelaporan keuangan yang dikembangkan dari penelitian Hanna and Haryanto (2016) dan Yunistiyani dan Tahar (2016) terhadap agresivitas pajak, sehingga penelitian ini agar dapat memberikan pengontrolan atas perilaku perusahaan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan khususnya perusahaan perbankan dan keuangan dalam rangka pelaksanaan dan pengungkapan tata kelola perusahaan yang baik agar terhindar dari tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan dan meningkatkan pembayaran pajak, serta berguna bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dalam rangka menghindari tindakan agresivitas pajak.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini memberikan gambaran atau sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi mengenai literatur review, kajian teori, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, variable penelitian dan pengukuran variable, dan metode analisis data yang akan digunakan untuk pengujian data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Perusahaan adalah salah satu wajib pajak yang harus membayar kewajiban pajaknya kepada Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran pajak perusahaan dianggap beban bagi perusahaan tersebut karena pembayaran berasal dari laba yang dihasilkan. Perusahaan wajib melakukan pembayaran pajak karena pajak menjadi salah satu penyumbang penghasilan Negara demi kesejahteraan masyarakat bersama. Negara sudah memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk melapor dan menyetor pajaknya. Oleh karena itu, jika pembayaran pajak tinggi maka akan mengurangi jumlah laba yang didapat dan perusahaan dapat mengalami kerugian. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan perusahaan untuk mencari cara mengurangi biaya pembayaran pajak kepada Negara (Novitasari, Vince, and Silfi, 2017).

Menurut Slemrod (2004) dalam Balakrishnan, Blouin dan Guay (2011) mengatakan bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Sedangkan menurut Khuruna dan Moser (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai *tax planning* perusahaan melalui aktivitas *tax avoidance* atau *tax sheltering*, sehingga tindakan agresivitas merupakan tindakan yang dirancang oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak agar memperoleh keuntungan (Novitasari, Vince, and Silfi 2017)

Dalam melakukan penghindaran pajak menurut Oktaviana (2014), adanya tindakan nyata dapat dilakukan secara yuridis yaitu dengan melakukan perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga tindakan yang dilakukan tidak terkena pajak. Perusahaan biasanya melakukan dengan cara memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang yang ada, contohnya pegawai diberi tunjangan beras (natura/kenikmatan).

Menurut Lanis and Richardson (2013) agresivitas pajak dilihat dari sudut pandang sosial, terjadi jika sebuah perusahaan menetapkan skema atau tujuan yang dominan untuk melakukan penghindaran pajak, maka pada umumnya perusahaan tersebut dianggap tidak adil dengan tidak melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah yang digunakan untuk menjamin pembiayaan barang publik. Kekurangan dalam pendapatan untuk pembayaran pajak dapat mengakibatkan permusuhan, rusaknya reputasi korporasi antara pemangku kepentingan perusahaan dan, paling buruk dapat memungkinkan pemberhentian operasi bisnis dalam korporasi. Hal ini juga dapat menghasilkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan dan berpotensi tidak dapat diperoleh lagi untuk masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, agresivitas pajak dianggap tidak dapat bertanggung jawab secara social. Sebagai isu yang menjadi perhatian utama publik, agresivitas pajak adalah strategi yang tidak sesuai dengan harapan perusahaan.

Dalam perkembangannya perusahaan melakukan penghindaran pembayaran pajak, salah satunya dengan melakukan agresivitas pajak. Beberapa factor yang dapat mempengaruhi adanya praktik agresivitas pajak. Menurut Luke dan Zulaikha (2016) agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajibannya. Berikut beberapa variable independen yang dapat memengaruhi aktivitas agresivitas pajak, diantaranya ialah faktor Likuiditas, leverage & komisaris independen oleh Tiaras and Wijaya (2015). Faktor SPI (sistem pengendalian internal), rapat dewan komisaris serta tipe auditor eksternal & ukuran komite audit yang dilakukan oleh Abdullah (2016). Kemudian adanya factor komite audit, kepemilikan institusional, agresivitas pelaporan keuangan dan kepemilikan keluarga yang dilakukan oleh Hanna and Haryanto (2016).

Selanjutnya pengaruh manajemen laba, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, frekuensi pertemuan komite audit dan intensitas modal yang dilakukan oleh Novitasari, Vince, dan Silfi (2017). Adanya factor *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Profitabilitas yang dilakukan oleh Tarigan et al. (2016). Yunistiyani dan Tahar (2016) meneliti adanya factor agresivitas pelaporan keuangan, komite audit dan CSR. Adanya factor analisis hubungan *corporate social responsibility* (CSR) dan Agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak dengan *good corporate governance* yang dilakukan oleh Wijayanti and Rismawati (2016).

Pengaruh factor mekanisme tata kelola yang diprosikan dengan keanekaragaman dan kepemilikan gender pada dewan perusahaan serta kepemilikan konsentrasi yang dilakukan oleh Boussaidi (2015). Factor tanggung jawab social dengan teori legitimasi oleh Lanis and Richardson (2013). Adanya factor kepemilikan uang kas atau nilai kas terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh Wang (2015). Kemudian adanya factor konservatisme akuntansi dan

struktur kepemilikan dari Kurniaty (2016). Terakhir factor lain yang mempengaruhi adalah keragaman gender dewan/direktur yang dilakukan oleh Lanis et al. (2017).

Pengertian Agresivitas Pajak

Definisi tindakan agresivitas pajak menurut Frank et al (2009) dalam Mangoting & Hadi (2014) adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong pelanggaran pajak. Kemudian menurut Ridha dan Martani (2014) agresivitas pajak adalah tindakan yang tidak hanya dari ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, namun juga berasal dari aktivitas penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan Hanlon dan Heitzman (2013) mendefinisikan agresivitas pajak adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam grey area. Kondisi tersebut menjadi peluang wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan kelemahan hukum sebagai argumen pembenaran atas penggelapan pajak.

Pengaruh Manajemen Laba

Menurut Novitasari, Vince, dan Silfi (2017), manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk menaikkan dan menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan tanpa menyebabkan kenaikan dan

penurunan laba ekonomis perusahaan jangka panjang. Kemudian, motivasi perusahaan untuk melakukan manajemen laba adalah:

1) *Bonus Plan Hypotesis* menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkan menjadi lebih tinggi.

2) *Debt (Equity) Hypotesis* menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya,

3) *Political Cost Hypotesis* dapat diartikan sebagai semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan laba yang tinggi membuat pemerintah akan segera mengambil tindakan seperti mengenakan peraturan kenaikan pajak pendapatan,

Dalam penelitian Novitasari, Vince, dan Silfi (2017) yang menjadi fokus utama dalam manajemen laba dalam agresivitas pajak yaitu motivasi pajak. Hal ini dapat dijelaskan karena dasar pengenaan pajak adalah jumlah penghasilan kena pajak yang dilaporkan oleh perusahaan maka perusahaan cenderung menjaga labanya pada level tertentu. Sehingga dapat diprediksikan bahwa perusahaan dengan tingkat pendapatan yang cenderung meningkat akan melakukan *income decreasing* untuk menurunkan pendapatan kena pajak sehingga perusahaan dapat

melakukan penghematan atas beban pajak. Menurut Suyanto dan Supramono (2012) dalam Novitasari, Vince, dan Silfi (2017) semakin besar *income decreasing* yang dilakukan maka perusahaan tersebut juga terindikasi berperilaku agresif terhadap pajak perusahaan karena laba menjadi patokan untuk mengukur besarnya beban pajak perusahaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Novitasari, Vince, dan Silfi (2017) adalah manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Dimana semakin besar *income decreasing* yang dilakukan maka perusahaan tersebut terindikasi berperilaku agresif terhadap pajak perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Novitasari, Vince, dan Silfi (2017) menyatakan Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajerial. Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajerial, dapat menyelaraskan antara kepentingan manajer dan pemegang saham lainnya sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham lainnya, memastikan kontrak berjalan dengan lancar, dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta dapat mengatasi masalah keagenan yang terjadi. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang mana pihak manajerial sebagai pemegang saham juga. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajerial akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari keputusan yang diambil.

Karena manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil salah. Dengan kepemilikan manajerial diharapkan dapat meminimalkan tindakan agresivitas pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Boussaidi (2015), pengaruh kepemilikan manajerial memiliki efek yang signifikan pada kegiatan perusahaan agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial mempunyai hubungan positif dengan efektifitas tarif pajak, sementara peningkatan kepemilikan cenderung berpengaruh secara negatif. Namun, temuan dari profil perusahaan menunjukkan efek yang signifikan dari keadaan dalam perusahaan dan pengaruh auditor eksternal terhadap agresivitas pajak. Hasil dari penelitian yang dilakukan Novitasari, Vince, and Silfi (2017) bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak karena persentase kepemilikan manajer lebih kecil dibandingkan investor lain sehingga tidak dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh top level manajemen dalam perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional

Menurut Novitasari, Vince, dan Silfi (2017), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh perusahaan, lembaga, bank, dan lain sebagainya atau dapat diartikan kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada

besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham.

Pihak investor institusional akan melakukan pengawasan secara aktif terhadap kinerja perusahaan karena di dalam institusi investor itu sendiri terdapat pihak yang profesional dalam melakukan pengawasan. Adanya pengawasan yang aktif dari pihak investor institusional menyebabkan tekanan pada perusahaan agar berfokus pada kepentingan ekonomi para investor institusional yaitu laba yang tinggi (Novitasari, Vince, dan Silfi, 2017). Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, maka dari itu menurut Hanna and Haryanto (2016) kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Novitasari, Vince, and Silfi (2017) mengenai Agresivitas pajak dengan variable independen Kepemilikan Institusional dapat secara signifikan mempengaruhi agresivitas pajak.

Pengaruh Komisaris Independen

Menurut penelitian Tiaras and Wijaya (2015), keberadaan Komisaris Independen di Indonesia telah diatur dalam Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mempunyai Komisaris Independen yang proporsinya sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan. Manajer melakukan agresivitas pajak perusahaan karena adanya kepentingan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengurangi beban perusahaan termasuk beban pajak.

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan hal tersebut tidak dibenarkan karena diantaranya menurut Tiaras and Wijaya (2015) bahwa komisaris independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunistiyani dan Tahar, (2016) tersebut mengatakan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Namun berbeda halnya hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Novitasari, Vince, and Silfi (2017) mengenai Agresivitas pajak adalah Komisaris Independen mempengaruhi agresivitas pajak. Dalam penelitiannya menunjukkan juga bahwa variabel *risk taker* menunjukkan nilai negatif dan sesuai teori. Nilai ini berarti semakin manajer bersifat *risk taker* semakin rendah pula nilai *effective tax rate*. Tetapi setelah *risk taker* dimediasi oleh komisaris independen maka hubungannya menjadi positif. Artinya meskipun karakter manajemen itu bersifat *risk taker* keberadaan dewan komisaris independen dapat menekan tindakan agresivitas pajak (meningkatkan *effective tax rate*). Sedangkan menurut Abdullah (2016) karakteristik komisaris independen yang diproksikan dengan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI) dan rapat dewan komisaris juga tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Pengaruh Komite Audit

Komite Audit sesuai dengan Kep-643/BL/2012, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan adanya pengawasan dari komite audit yang intensif, maka informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas sehingga kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya cenderung berkurang (Novitasari, Vince, dan Silfi, 2017) .

Menurut Abdullah (2016), komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal tersebut juga didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanna and Haryanto (2016) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunistiyani dan Tahar (2016) tersebut mengatakan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan menurut Novitasari, Vince, and Silfi (2017) bahwa Komite Audit tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

Pengaruh Intensitas Modal

Menurut Novitasari, Vince, and Silfi (2017), Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal). Intensitas modal dapat mencerminkan seberapa

besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan, jadi intensitas modal dapat menjadi indikator perusahaan dalam memperebutkan pasar. Dalam penelitian ini menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap merupakan seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset tetap yang dimiliki. Dengan meningkatnya aset tetap perusahaan maka dapat meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga penghasilan perusahaan juga meningkat. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga laba menjadi turun dan beban pajak perusahaan menjadi turun juga. Jadi dengan tingginya jumlah aset yang dimiliki perusahaan mendorong perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Namun berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian tersebut mengenai Agresivitas pajak bahwa *Intensitas Modal* tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Lanis dan Richardson (2012) sebuah perusahaan yang terlibat dalam kebijakan agresivitas pajak secara sosial tidak dapat bertanggung jawab. Cheng et.al (2011) dalam Lanis dan Richardson (2012) mengungkapkan perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab memiliki kemungkinan lebih tinggi dalam tindakan Agresivitas pajak. William (2007) dalam Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa sulit untuk membedakan antara CSR yang dilakukan dengan motif altruistik dengan CSR yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan reputasi perusahaan. Sebaliknya, banyak aksi perusahaan yang dilakukan dengan motif ganda. CSR kini dapat di kompensasikan kedalam pengurangan pajak. Oleh karena itu penting dalam mempertimbangkan

bagaimana CSR dapat mempengaruhi agresivitas pajak tanpa membuat setiap upaya untuk membedakan antara tindakan yang diambil karena perusahaan benar-benar ingin bertanggung jawab maupun tindakan yang diambil karena tujuan tertentu.

Menurut Watson (2011) dalam Yunistiyani dan Tahar (2016.) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki peringkat rendah dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan CSR yang rendah dapat melakukan agresivitas pajak yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang lebih tinggi. Atau Semakin banyak pengeluaran maka perusahaan semakin agresif, karena Perusahaan yang memiliki peringkat CSR rendah dianggap tidak bertanggungjawab secara sosial. Adanya CSR menjadikan perusahaan memiliki dua kewajiban, yaitu kegiatan CSR dan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Tarigan et al. (2016) bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresifitas pajak perusahaan. Semakin banyak kegiatan CSR yang dilakukan dan diungkapkan oleh perusahaan maka akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan, dan hal itu menyebabkan perusahaan tidak melakukan tindakan agresifitas pajak yang melanggar hukum. Sedangkan hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Yunistiyani dan Tahar, (2016) mengatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR), dapat berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Lain halnya dengan hasil penelitian Wijayanti and Rismawati (2016) mengatakan bahwa

variable CSR tidak berpengaruh signifikan untuk agresivitas pajak. Padahal, hal ini menunjukkan bahwa biaya CSR dihabiskan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat tidak sebagai instrumen untuk melakukan agresivitas pajak.

Pengaruh Agresivitas Pelaporan Keuangan

Komponen laporan yang menjadi pusat perhatian dan dijadikan acuan penilaian kinerja perusahaan adalah laba perusahaan. Informasi tentang laba (*earnings*) mempunyai peran sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Pihak internal dan eksternal perusahaan sering menggunakan laba sebagai dasar pengambilan keputusan seperti pemberian kompensasi dan pembagian bonus kepada manajer, pengukur prestasi atau kinerja manajemen, dan dasar penentuan besarnya pengenaan pajak (Hanna and Haryanto 2016). Menurut Frank et.al. (2009) dalam Hanna and Haryanto (2016), kegiatan meningkatkan laba perusahaan melalui *earning management*, baik sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dikenal dengan istilah agresivitas pelaporan keuangan. Agresivitas pelaporan keuangan dapat tercermin melalui manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Sedangkan Ewert dan Wagenhofer (2005) dalam Hanna and Haryanto (2016) menyatakan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk manajemen laba adalah melalui penggunaan kebebasan atau diskresi untuk memilih metode dan estimasi akuntansi yang akan digunakan. Pengukuran manajemen laba atau tindakan pelaporan keuangan agresif sangat bermacam-macam. Namun, proksi yang sering digunakan adalah akrual diskresioner pada laporan keuangan perusahaan. Akrual diskresioner didapatkan sebagai residu dari regresi besaran pendapatan akrual (Jones, 1991). Model Jones

ini kemudian banyak dikembangkan pada penelitian-penelitian selanjutnya, diantaranya Dechow et al. (1995), Kasznik (1999), Dechow et al. (2002), Kothari (2005).

Hasil yang dapat disimpulkan oleh penelitian Hanna and Haryanto (2016) menunjukkan bahwa agresivitas pelaporan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yunistiyani dan Tahar (2016) mendukung adanya pengaruh agresivitas pelaporan keuangan yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Pengaruh Kepemilikan Keluarga

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hanna and Haryanto (2016) mengenai pengaruh kepemilikan keluarga terhadap agresivitas pajak ialah menurut Siregar et al., (2008) menemukan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan pada jenis manajemen laba yang dipilih. Perusahaan dengan proporsi dari kepemilikan keluarga yang tinggi dan non-bisnis kelompok lebih cenderung untuk memilih manajemen laba efisien daripada jenis perusahaan lain. Kepemilikan saham di negara berkembang sebagian besar dikontrol oleh kepemilikan keluarga, termasuk perusahaan di Indonesia. Masalah keagenan pada perusahaan milik keluarga lebih sedikit karena memiliki sedikit konflik antara principal dan agent. Namun jika ada kepentingan minoritas di perusahaan milik keluarga, akan timbul masalah agensi lainnya, yaitu konflik kepentingan antara mayoritas (keluarga) dan kepemilikan minoritas (Arifin, 2003). Fama dan Jensen

(1983) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga lebih efisien daripada perusahaan yang dimiliki publik karena biaya pengawasan yang dikeluarkan atau monitoring costnya lebih kecil. Sedangkan hasil yang didapat dari penelitian Hanna and Haryanto (2016) bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Likuiditas dan Leverage

Menurut Subramanyam dan Wild (2010:241) dalam Tiaras and Wijaya (2015) mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, 'jangka pendek' dianggap periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Dengan demikian likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan. Likuiditas dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam kaitannya dengan pajak, Suyanto dan Supramono (2010) menyatakan bahwa likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Senada dengan hal tersebut Bradley dan Siahaan dalam Suyanto dan Supramono (2010) yang menemukan bahwa perusahaan yang memiliki arus kas yang rendah akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan dari pada harus membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Tiaras and Wijaya (2015) *Leverage* adalah ukuran persentase total aset perusahaan yang diperoleh dari pihak kreditur (Kieso *et al*, 2009:796). Mills dalam Dunbar (2011) berpendapat bahwa *leverage* mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih untuk menghindari pajak melalui transaksi-transaksi keuangan. Graham dan Tucker (dalam Dunbar, 2011) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang lebih tinggi kurang membutuhkan *tax shield* yang tidak berasal dari utang sehingga mengurangi perilaku pajak agresif.

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya menurut Tiaras and Wijaya (2015) bahwa likuiditas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti and Rismawati, (2016) *Likuiditas* dan *Leverage* tidak berpengaruh signifikan untuk agresivitas pajak. Padahal, hal ini menunjukkan bahwa biaya CSR dihabiskan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat tidak sebagai instrumen untuk melakukan agresivitas pajak. Kemudian hal tersebut juga mendukung hasil dari pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak yaitu menurut Tiaras and Wijaya (2015) bahwa *leverage* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Pengaruh tingkat konservatisme akuntansi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurniaty (2016). Mills (1998) dalam Suprianto dan Dewi (2014) menyatakan bahwa pengukuran dalam laba

akuntansi menurut metoda akuntansi komersial tidak independen terhadap pengukuran menurut fiskal, sehingga diduga konservatisme akuntansi menyebabkan penetapan pajak penghasilan menurut perusahaan lebih rendah dibandingkan hasil perhitungan menurut fiskus. Penggunaan metode akuntansi yang konservatif menaikkan nilai ETR. Karena ETR berbanding terbalik dengan ATA, maka kenaikan ETR merupakan indikasi penurunan tindakan aggressive tax avoidance, namun hasil penelitian Kurniaty (2016) menunjukkan beberapa persen membuktikan bahwa konservatisme akuntansi dan struktur kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap tindakan aggressive tax avoidance.

Pengaruh Profitabilitas

Menurut Sofyan safri Harahap (2011:304), Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran ingkat efektifitas manajemen suau perusahaan. Dalam kaitannya dengan profitabilits Surbakti (2012), menjelaskan profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al., 2010). Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Atau dapat dikatakan ada

kemungkinan upaya dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Hanafi dan Halim, (2009:27) dalam Yunistiyani dan Tahar (2016)) .

Hasil Penelitian oleh Tarigan et al. (2016), menyatakan bahwa variabel Profitabilitas perusahaan terbukti berpengaruh terhadap agresifitas pajak perusahaan. semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka perusahaan akan lebih menaati peraturan perpajakan dengan tidak melakukan agresifitas pajak. Namun apabila tingkat profitabilitas perusahaan rendah, hal tersebut akan memicu perusahaan tersebut melakukan tindakan agresifitas demi mempertahankan aset perusahaan. Penelitian lain menunjukkan bahwa kondisi keuangan yang diprediksi dengan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap Agresivitas pajak (Wijayanti and Rismawati, 2016).

Pengaruh kepemilikan kas

Menurut Hanlon et al. (2013) dalam Wang (2015), kepemilikan kas dapat meningkat apabila risiko pajak berkorporasi secara signifikan. Tidak seperti kertas mereka, yang menggunakan tingkat kas sebagai ukuran kepemilikan uang tunai, menggunakan sensitivitas arus kas dari kas (Almeida et al., 2004) untuk memeriksa apakah dan bagaimana perusahaan penghindaran pajak mempengaruhi tabungan uang tunai, yang dapat memberikan bukti baru pada hubungan antara pajak perusahaan penghindaran dan uang tunai kepemilikan dari pandangan yang berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, serangkaian penelitian telah menemukan bahwa masalah keagenan juga merupakan penentu penting atau motivasi bagi penghindaran pajak perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2006; Desai et al, 2007).

Hal ini dapat meramalkan bahwa, di negara-negara atau daerah dengan derajat yang berbeda dari pengembangan pasar modal dan tingkat perlindungan hukum, konsekuensi ekonomi dari penghindaran pajak korporasi juga bisa berbeda. Maka dari itu dengan adanya isu-isu tersebut Wang (2015) melakukan penelitian dengan simpulan meningkatnya tingkat penghindaran pajak, insentif pencegahan uang tunai, dan tingkat kendala keuangan juga meningkat, yang akan membuat tingkat perusahaan uang tabungan meningkat. Sementara itu, meskipun penghindaran pajak akan mendorong transparansi yang lebih rendah dan biaya agensi yang lebih tinggi, nilai marginal dari kas yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang lebih agresif lebih tinggi karena efek persaingan pasar yang lebih tinggi dari uang tunai. Kesimpulan variable kepemilikan kas dalam penelitian tersebut tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dalam penelitian Yunistiyani dan Tahar (2016) terdapat variable moderasi yaitu Good Corporate Governance yang memoderasi hubungan agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut menggunakan variabel proporsi komisaris independen dan komite audit untuk memproksikan GCG menunjukkan bahwa sebagai pemoderasi tidak berpengaruh atas hubungan agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak. Kemudian dalam penelitian Kurniaty (2016) yang menggunakan variable control ROA terhadap agresivitas pajak menunjukkan bahwa variable tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang konsisten, seperti variabel manajemen laba dalam penelitian Novitasari, Vince, dan Silfi (2017), variabel

kepemilikan institusional dalam penelitian Hanna and Haryanto (2016) dan Novitasari, Vince, and Silfi (2017), variable intensitas modal dalam penelitian Novitasari, Vince, and Silfi (2017), variable kepemilikan keluarga dalam penelitian Hanna and Haryanto (2016), kemudian variable corporate social responsibility dalam penelitian Tarigan et al. (2016), Yunistiyani dan Tahar, (2016) dan Wijayanti and Rismawati (2016), variable leverage dan likuiditas yang dilakukan oleh Tiaras and Wijaya (2015) dan Wijayanti and Rismawati (2016), variable profitabilitas yang dilakukan oleh Tarigan et al. (2016), dan Wijayanti and Rismawati (2016), variable kepemilikan kas dalam penelitian Wang (2015). Hasil-hasil tersebut terbukti secara signifikan mempengaruhi agresivitas pajak. Kemudian variable konservatisme akuntansi oleh Kurniaty (2016) yang menyatakan negatif signifikan dalam mempengaruhi agresivitas pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten, seperti variabel variabel kepemilikan manajerial dalam penelitian Boussaidi (2015), Novitasari, Vince, and Silfi (2017), variabel komisaris independen dalam penelitian Tiaras and Wijaya (2015), Yunistiyani dan Tahar (2016), Novitasari, Vince, and Silfi (2017) dan Abdullah (2016), variable komite audit dalam penelitian Abdullah (2016), Hanna and Haryanto (2016), Yunistiyani dan Tahar (2016), dan Novitasari, Vince, and Silfi (2017), variable agresivitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Hanna and Haryanto (2016) dan Yunistiyani dan Tahar (2016). Hasil penelitian tersebut dapat dikatakan tidak konsisten karena beberapa penelitian ada yang mendukung dan tidak mendukung factor yang menjadi pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Beberapa kelemahan dalam penelitian mengenai agresivitas pajak ialah

seperti penelitian oleh Kurniaty (2016) yang menggunakan variabel kontrol ROA mengakibatkan nilai bias pada signifikansi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Tindakan agresivitas pajak dalam penelitian ini tidak dipengaruhi oleh ROA, dikarenakan kenaikan dan penurunan laba dan total aset lebih disebabkan oleh faktor eksternal seperti krisis ekonomi global dan peningkatan inflasi serta kondisi politik suatu negara. Kemudian kelemahan dalam penelitian Luke dan Zulaikha (2016) serta Yunistiyani dan Tahar (2016) adalah tingkat agresivitas pajak perusahaan hanya diukur melalui data yang tersedia dalam laporan keuangan, tidak dapat melalui SPT karena data SPT bersifat privat dan tidak tersedia, sehingga dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lain agar mengembangkan faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Selain itu penelitian selanjutnya juga disarankan untuk membedakan penelitian berdasarkan industrinya atas kelemahan yang terdapat dalam penelitian Hanna and Haryanto (2016) dan Kurniaty (2016) karena tidak membedakan penelitian agresivitas pajak tersebut berdasarkan industry lain sehingga hasil tidak dapat digeneralisir. Untuk mendapatkan hasil yang lebih dan dapat digeneralisir, maka seperti halnya pada industri keuangan dengan memilih sektor yang lebih spesifik lagi yaitu pada perusahaan perbankan.

Dalam penelitian Mangoting & Hadi (2014) menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk mengembangkan variabel struktur kepemilikan dengan mendefinisikan struktur kepemilikan keluarga, sehingga dapat lebih diperjelaskan apakah struktur kepemilikan keluarga melakukan agresivitas pajak atau tidak. Penelitian Kurniaty (2016) menyarankan untuk melakukan pengawasan yang lebih

intensif kepada perusahaan dengan kepemilikan asing, karena secara empiris terdapat kemungkinan penghindaran pajak dilakukan dengan modus transfer pricing. Serta menambahkan proksi lain dalam mengukur tindakan agresivitas pajak seperti *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, *Book Tax Different (BTD)* dan *NPM (Net Profit Margin)*. Saran untuk penelitian selanjutnya juga dapat melakukan simulasi terhadap variabel lain seperti ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kompensasi rugi fiskal, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih kokoh dan konsisten terhadap tindakan agresivitas pajak. Saran selanjutnya menggunakan proksi lain seperti *return on equity (ROE)* untuk mengukur variabel kontrol profitabilitas selain dengan ROA. Saran lain yang diberikan oleh Hanna and Haryanto (2016) ialah menggunakan proksi lain dalam pengukuran agresivitas pajak seperti mempertimbangkan *book-tax difference* dan menggunakan pengukuran agresivitas pelaporan keuangan dengan pendekatan lainnya.

Berdasarkan saran dan kelemahan dari penelitian sebelumnya, maka pembaharuan penelitian ini akan berfokus pada variabel yang tidak konsisten seperti pengaruh kepemilikan manajerial dalam penelitian Boussaidi (2015), Novitasari, Vince, and Silfi (2017), variabel komisaris independen dalam penelitian Tiaras and Wijaya (2015), Yunistiyani dan Tahar (2016), Novitasari, Vince, and Silfi (2017) dan Abdullah (2016), variable komite audit dalam penelitian Abdullah (2016), Hanna and Haryanto (2016), Yunistiyani dan Tahar (2016), dan Novitasari, Vince, and Silfi (2017), variable agresivitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Hanna and Haryanto (2016) dan Yunistiyani dan Tahar (2016).

Pembaharuan dalam penelitian ini selanjutnya adalah peneliti akan menjawab saran yang diberikan oleh penelitian Kurniaty (2016) yaitu peneliti akan menggunakan variabel kontrol dengan menggunakan proksi *return on equity* (ROE). Kemudian dikarenakan agar memberikan kualitas peningkatan laba maka peneliti juga akan menggunakan sector perbankan untuk menjawab saran yang diberikan oleh Hanna and Haryanto (2016) dan Kurniaty (2016). Penelitian ini juga akan menambahkan variabel baru seperti menggunakan variabel konservatisme akuntansi atas saran penelitian Kurniaty (2016) dan tata kelola perusahaan atas saran penelitian Hanna and Haryanto (2016). Selanjutnya untuk menjawab saran dari peneliti Hanna and Haryanto (2016) maka penelitian ini akan fokus dengan proksi lain untuk mengukur tindakan agresivitas pajak yaitu dengan *Book Tax Different (BTD)*, selain dengan menggunakan ETR.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Agensi

Perkembangan tata kelola perusahaan yang berasal dari teori keagenan (*Agency Theory*) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 menyatakan bahwa teori yang mendasarkan pada konflik yang timbul antara principal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Principal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan.

Dalam penelitian ini teori agensi dianggap sesuai karena agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal

kepadanya. Manajemen dianggap akan bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Adanya pemisahan kepemilikan dan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen menimbulkan *agency problem* (konflik kepentingan). Konsep *good governance* mengacu pada teori keagenan, karena pengelolaan manajemen yang baik harus dikendalikan dan diawasi sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku.

Sebagai pihak yang mengelola perusahaan, manajemen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas perusahaan, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Disisi lain pemegang saham tidak mempunyai informasi cukup tentang kinerja manajemennya. Hal ini mengakibatkan ketimpangan informasi antara pemegang saham dan manajemen yang disebut dengan *asymmetric information*. Sehingga akan menimbulkan ketidaksonkronan antara pengambil keputusan manajer dengan para pemegang saham. Hal tersebut dapat menimbulkan dua permasalahan menurut Jensen dan Meckling (1976), adalah sebagai berikut:

- a. *Moral Hazard* yaitu permasalahan yang terjadi jika agen tidak melaksanakan bersama apa yang telah disepakati dalam kontrak kerja.
- b. *Adverse selection* yaitu prinsipal tidak dapat mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh agen didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi kelalaian dalam tugas.

2.2.2 Teori Stakeholder

Stakeholder Theory atau Teori Pemangku Kepentingan memposisikan Pemegang Saham atau Pemilik Modal merupakan salah satu dari sejumlah

kelompok stakeholder yang penting. Sama seperti pelanggan, pemasok, karyawan dan masyarakat lokal. Pemegang saham memiliki saham dan dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan perusahaan.

Dalam hukum perusahaan, Pemegang saham diberi status unggulan sebagai pemilik perusahaan. Mereka mampu memilih semua atau sebagian besar anggota Direksi, memiliki hak untuk mempekerjakan dan memecat para eksekutif senior dan menyetujui atau menolak kebijakan penting dan strategi perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi karena status yang luar biasa atas kendali yang dimiliki oleh Pemegang Saham berdasarkan hukum perusahaan yang berlaku. Asumsinya adalah bahwa Pemegang Saham sudah memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diperhitungkan oleh perusahaan dan para manajernya.

“Teori *stakeholder* menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, social dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder*. Teori *stakeholder* memiliki bidang etika (moral) dan manajerial. Bidang etika berargumen bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh *stakeholder*.”

Teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan *stakeholder*, sehingga aktivitas perusahaan juga mempertimbangkan persetujuan dari *stakeholder*. Semakin kuat *stakeholder*, maka

perusahaan harus semakin beradaptasi dengan *stakeholder*. Pengungkapan sosial dan lingkungan kemudian dipandang sebagai dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*. Beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*, yaitu: 1) Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka. 2) Dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan. 3) Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan. 4) LSM dan pencinta lingkungan makin vokal dalam mengkritik perusahaan-perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.

Dalam teori ini pemegang saham sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap suatu manajemen. Semakin banyak pemegang saham tersebut maka akan semakin kuat kendali yang dilakukan dan semakin banyak pula laba yang harus dihasilkan oleh suatu manajemen. Maka pajak yang harus dibayarkan sebaiknya sesuai dengan laba yang telah dihasilkan, agar semuanya menguntungkan berbagai pihak, seperti halnya pemerintah. Pemerintah sebagai regulator, merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, ketaatan membayar pajak, dan tidak melakukan penghindaran pajak. Menurut Landolf (dalam Oktaviana, 2014) penghindaran pajak merupakan hal yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Hal ini tidak sesuai dengan teori *stakeholder* yang

menyebutkan bahwa perusahaan selalu mengusahakan dukungan dari stakeholdernya.

2.2.3 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif adalah teori yang memprediksi adanya tindakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dan bagaimana manajer akan merespon kebijakan akuntansi baru yang diusulkan oleh pemerintah. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan pengakuan dan perlakuan penghasilan dan biaya yang terjadi karena keputusan yang dibuat oleh manajemen. BTD diprediksi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena adanya perbedaan mekanisme dalam perhitungan laba. Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal juga dapat dipengaruhi oleh pilihan metode akuntansi dalam proses akrual (Sartika, 2016).

2.2.4 Pajak

Pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, dalam pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut pendapat Barata (2010) dalam Hanna and Haryanto (2016), pajak merupakan iuran kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat timbal jasa (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban dan keharusan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang demi kepentingan umum.

2.2.5 Agresivitas Pajak

Tindakan agresivitas pajak menurut Frank et al (2009) dalam Mangoting & Hadi (2014) adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong pelanggaran pajak. Kemudian menurut penelitian Mangoting & Hadi (2014) sendiri, tindakan agresivitas pajak adalah suatu tindakan atau strategi penghindaran pembayaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan atau dengan menggunakan celah hukum atau *loop-holes*.

Menurut Suandy (2011:2) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan tindakan pajak agresif, antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran;
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran;
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran; dan

4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Selain itu terdapat tiga keuntungan dari tindakan pajak agresif yang dijelaskan oleh Hidayanti (2013) :

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.
3. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan rent extraction (Chen et al, 2010).

Sedangkan kerugian dari tindakan pajak agresif diantaranya adalah :

1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan (Sari dan Martani, 2010).
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.

2.3 Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* tercantum di dalam amanat konstitusi UU No. 4 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas yang menggantikan UU No.1 Tahun 1995 sebagai penyempurnaan atas konsep

pengelolaan perseroan yang mendukung implementasi dari tata kelola. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa tata kelola perusahaan terdiri dari berbagai elemen diantaranya, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit.

Menurut Komite Cadbury (1992), *Good Corporate Governancce* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *shareholder* khususnya dan *stakeholders* pada umumnya.

Pengertian lain menurut lembaga *Finance Committee on Corporate Governance Malaysia* ialah GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Sedangkan menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, GCG didefinisikan sebagai proses dan struktur yang ditetapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.

Tata Kelola perusahaan yang baik menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Menurut Moeljono (2005) Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua *stakeholder*. Ada 2 hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu pentingnya hak Pemegang Saham untuk memperoleh informasi yang benar (akurat) dan tepat pada waktunya, serta kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholders.

Tata Kelola perusahaan yang baik atau GCG didefinisikan sebagai komitmen, aturan main serta praktek penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika dengan menekankan keharusan adanya komitmen dalam pengaplikasiannya. Keberadaan kebijakan dan kelengkapan infrastruktur GCG menjadi kehilangan makna tanpa didasari komitmen untuk melaksanakannya. Disinilah, betapa peran Pemegang Saham, Dewan/Bawas/Dekom dan Direksi (*Top Management*) sebagai Top Leader menjadi pendorong dalam kesungguhan pembangunan Perusahaan yang ber-GCG dengan prinsip-prinsip, sebagai berikut :

1. Partisipasi
2. Responsibilitas
3. Independen
4. Kewajaran (*Fairness*)
5. Akuntabilitas
6. Transparansi

2.3.1 Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, (2000), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *good corporate governance* antara lain sebagai berikut :

1. Meminimalkan *agency cost*
2. Meminimalkan *cost of capital*
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan
4. Mengangkat citra perusahaan

Proksi yang digunakan dalam mengukur penerapan *good corporate governance* ialah sebagai berikut:

1. Kepemilikan Manajerial

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Novitasari, Vince, dan Silfi (2017) menyatakan Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajerial. Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajerial, diharapkan dapat menyelaraskan antara kepentingan manajer dan pemegang saham lainnya sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham lainnya, guna memastikan kontrak berjalan dengan lancar, dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta dapat mengatasi masalah keagenan yang terjadi. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang mana pihak manajerial sebagai pemegang saham juga. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajerial akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat baik secara langsung maupun tidak

langsung dari keputusan yang diambil. Karena manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil jika salah.

2. Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-41/PM/2003, komisaris independen adalah anggota komisaris yang (1) berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, (2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, (3) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, dan (4) tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Menurut penelitian Tiaras and Wijaya (2015), keberadaan Komisaris Independen di Indonesia telah diatur dalam Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mempunyai Komisaris Independen yang proporsinya sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan.

3. Komite Audit

Komite Audit sesuai dengan Kep-643/BL/2012, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan

dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan adanya pengawasan dari komite audit yang intensif, maka informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas sehingga kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya cenderung berkurang (Novitasari, Vince, dan Silfi, 2017).

2.4 Konservatisme Akuntansi

Menurut Sari (2004) konservatisme merupakan prinsip yang paling mempengaruhi penilaian dalam akuntansi. Defenisi konservatisme yang lebih deskriptif adalah memilih prinsip akuntansi yang mengarah pada minimalisasi laba kumulatif yang dilaporkan yaitu mengakui pendapatan lebih lambat, mengakui biaya lebih cepat, menilai aset dengan nilai terendah, dan menilai kewajiban dengan nilai yang lebih tinggi (Anggraini, dkk., 2008 dalam Nurjannah 2017).

Menurut Suwardjono (2014: 245) implikasi konsep konservatisme terhadap prinsip-prinsip akuntansi yaitu mengakui biaya atau rugi yang memungkinkan akan terjadi, tetapi tidak segera mengakui pendapatan atau laba yang akan datang walaupun kemungkinan terjadinya besar. Konservatisme akuntansi yang dianut oleh perusahaan dalam kebijakannya mengenai angka yang disajikan menegaskan bahwa nilai untuk mengungkap bebannya lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan pada saat menanggapi *bad news* dan tidak meningkatkan nilai pendapatannya pada saat menanggapi *good news* hal ini dilakukan oleh manajer untuk meminimalisir kemungkinan kerugian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ibaratnya manajer perusahaan akan mengambil suatu kebijakan, perlakuan

atau tindakan akuntansi yang didasarkan pada keadaan, harapan atas kejadian, konsekuensi atau hasil yang dianggap kurang atau tidak menguntungkan untuk perusahaan.

Watts (2003) dalam Nasir, dkk (2014) mendefinisikan konservatisme sebagai perbedaan verifiabilitas yang diminta untuk pengakuan laba dibandingkan rugi. Watts juga menyatakan bahwa konservatisme akuntansi muncul dari insentif yang berkaitan dengan biaya kontrak, litigasi, pajak, dan politik yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengurangi biaya keagenan dan mengurangi pembayaran yang berlebihan kepada pihak-pihak seperti manajer, pemegang saham, pengadilan dan pemerintah. Hal tersebut didukung juga oleh Hendrikson, et al (1992) dalam Suprianto, dkk (2014) bahwa penggunaan konsep konservatisme akuntansi juga didasarkan pada alasan dalam pembayaran pajak. Konsep konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian pihak manajemen perusahaan dalam menanggapi risiko dengan menunda pengakuan pendapatan. Penundaan pengakuan pendapatan akan mengakibatkan laba yang dilaporkan semakin kecil sehingga akan berdampak pada pembayaran pajak yang semakin rendah karena mengikuti perolehan laba (Nurjannah. 2017).

2.5 Agresivitas Pelaporan Keuangan

Komponen laporan yang menjadi pusat perhatian dan dijadikan acuan penilaian kinerja perusahaan adalah laba perusahaan. Informasi tentang laba (earnings) mempunyai peran sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan. Pihak internal dan eksternal perusahaan sering

menggunakan laba sebagai dasar pengambilan keputusan seperti pemberian kompensasi dan pembagian bonus kepada manajer, pengukur prestasi atau kinerja manajemen, dan dasar penentuan besarnya pengenaan pajak (Hanna and Haryanto 2016).

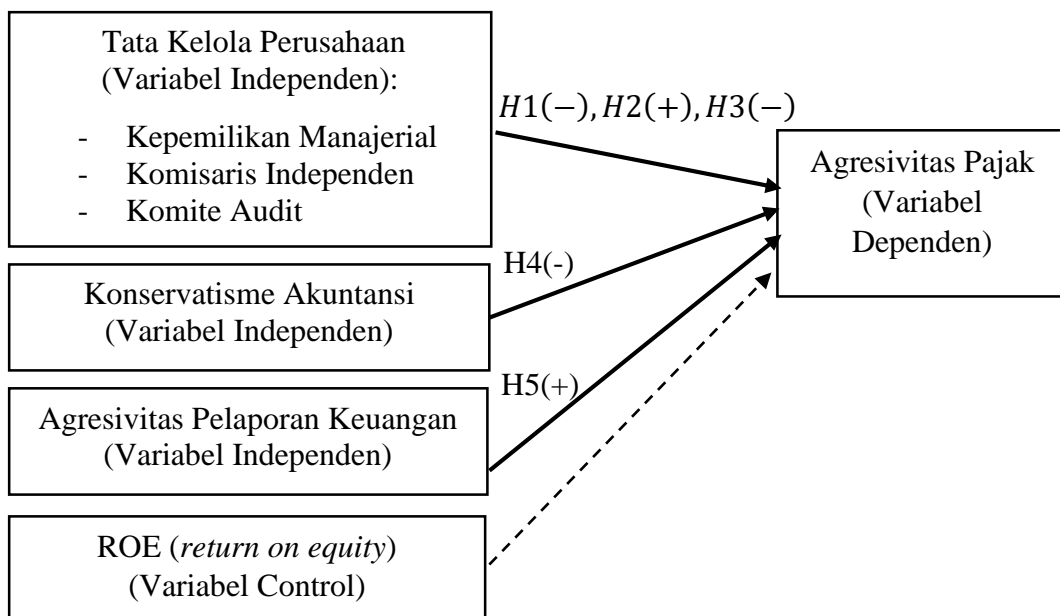
Menurut Frank et.al. (2009) dalam Hanna and Haryanto (2016), kegiatan meningkatkan laba perusahaan melalui earning management, baik sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dikenal dengan istilah agresivitas pelaporan keuangan. Agresivitas pelaporan keuangan dapat tercermin melalui manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Sedangkan Ewert dan (2005) dalam Hanna and Haryanto (2016) menyatakan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk manajemen laba adalah melalui penggunaan kebebasan atau diskresi untuk memilih metode dan estimasi akuntansi yang akan digunakan. Pengukuran manajemen laba atau tindakan pelaporan keuangan agresif sangat bermacam-macam.

2.6 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian digunakan untuk mempermudah dalam memahami arah penelitian ini dalam memahami pengaruh tata kelola perusahaan, konservatisme akuntansi dan agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak. Berikut adalah kerangka pemikiran yang akan mendasari penelitian ini pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Arah Penelitian



2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajerial baik dimiliki oleh direksi, komisaris maupun karyawan dengan persyaratan tertentu untuk memiliki saham tersebut. Menurut Novitasari, Vince, and

Silfi (2017), semakin besar proporsi kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang mana pihak manajerial berperan sebagai pemegang saham juga. Hal tersebut sejalan dengan teori *stakeholder* yang ada, menyatakan bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya, mendapat dukungan dari *stakeholder* yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan kinerjanya. Namun dalam mewujudkan *good governance* yang baik dalam kepemilikan manajerial, prinsip transparansi dan responsibilitas perlu lebih ditekankan lagi agar dapat meminimalkan *agency cost* dalam perusahaan guna mengurangi tindakan agresivitas pajak. Karena kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai situasi dimana terjadi peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau dengan kata lain seorang manajer perusahaan memiliki saham perusahaan tersebut.

Keterlibatan manajer yang sejajar dengan pemegang saham (*stakeholder*) akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari keputusan yang diambil. Manajemen juga akan ikut menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil salah. Kepemilikan manajerial baiknya mampu bertindak kooperatif dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan kepemilikan manajerial diharapkan dapat meminimalkan tindakan agresivitas pajak karena responsibilitas akan tinggi dan lebih transparan.

Kepemilikan manajerial diartikan dapat berperan sebagai pemegang saham yang nantinya berfungsi untuk mengawasi manajemen dalam kinerja operasinya, sehingga dapat mengurangi praktik agresivitas pajak dalam perusahaan tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Boussaidi (2015), bahwa kepemilikan manajerial memiliki efek yang signifikan pada kegiatan perusahaan yang berpengaruh dengan agresivitas pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari, Vince, and Silfi (2017) bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₁: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap tindakan Agresivitas Pajak.

2.7.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Mengacu pada Peraturan Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua 1906 Bapepam dan LK Kep-643/BL/2012, menyatakan bahwa Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

Komisaris independen bertolak belakang dengan teori *stakeholder* karena komisaris independen bukanlah pemegang saham, yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada suatu emiten atau perusahaan public. Untuk mewujudkan *good governance* dalam teori agency komisaris independen hanya bertindak sebagai dewan pengawas, yang mengawasi kinerja apakah manajemen sudah mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan kepada pemegang saham perusahaan tersebut. Karena komisaris independen hanya bertindak sebagai pengawas di luar pemegang saham, dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi

kesempatan manajer untuk melakukan agresivitas pajak, namun tak dapat dipungkiri, Manajer pun dapat melakukan agresivitas pajak perusahaan karena adanya kepentingan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengurangi beban perusahaan termasuk beban pajak (Novitasari, Vince, and Silfi, 2017). Terkait dengan proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, bahwa perusahaan tercatat harus memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Kehadiran komisaris independen juga dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan dengan memanfaatkan celah yang ada, karena meski komisaris independen bukanlah sebagai *stakeholder* namun sebagai dewan pengawas maka disisi lain perusahaan dengan berbagai cara harus mendapatkan laba yang tinggi dan mengurangi pembayaran beban pajak tanpa sepengetahuan dewan komisaris.

Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari, Vince, and Silfi (2017) bahwa komisaris independen dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, dengan adanya pengawasan dari komisaris independen yang intensif, maka informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas sehingga kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya cenderung berkurang. Serta dalam beberapa kesempatan komisaris independen tidak secara ketat mengawasi atau pengawasan yang lemah dapat memberikan celah bagi pelaku untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Menurut Fama & Jensen (dalam Suyanto dan Supramono, 2010, dalam Tiaras and Wijaya, 2015) memang semakin banyak komisaris independen maka pengawasan terhadap kinerja manajer dianggap lebih efektif. Dengan adanya pengawasan yang

ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan. Karena komisaris independen melakukan pengawasan yang ketat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga apabila manajer, melakukan agresivitas pajak tanpa sepengetahuan yang lain maka hal tersebut terjadi karena adanya kepentingan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengurangi beban perusahaan termasuk beban pajak dan akan merugikan perusahaan.

Berbeda halnya menurut Herawaty (2008) dalam Hanna and Haryanto (2016) menjelaskan dalam penelitiannya untuk memasukkan peran monitoring yang dilakukan dewan komisaris independen sebagai salah satu mekanisme corporate governance yang diukur dengan persentase dewan komisaris independen dibanding total dewan komisaris yang ada, guna mengurangi tindakan untuk melakukan agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₂: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap tindakan Agresivitas Pajak.

2.7.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris suatu perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tersebut.

Salah satu faktor penting yang menentukan tata kelola perusahaan atau *good governane* adalah independensi komite audit. Auditor memiliki tanggung jawab untuk memastikan jika posisi keuangan diungkapkan sesuai dengan standar atau belum secara andal oleh entitas (Pelucco- Greco et al., 2014 dalam Hanna and Haryanto, 2016). Dengan adanya pengawasan dari komite audit yang intensif maka kinerjanya akan semakin baik serta informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas sehingga kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya cenderung berkurang, karena komite audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Novitasari, Vince, and Silfi 2017). Melalui komite audit diharapkan masalah pada asimetri informasi dalam teori keagenan dapat berkurang.

Sama halnya dengan komisaris independen, komite audit berfungsi sebagai pengawas untuk manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Seperti halnya dalam teori agensi, komite audit berperan sebagai pengawas dalam manajemen agar tidak menimbulkan informasi yang asimetri maupun *agency cost* saat melaporkan hasilnya kepada pemegang saham. Dengan kata lain komite audit dapat sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham agar tidak tercipta pengurangan pembayaran beban pajak perusahaan secara agresif. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunistiyani dan Tahar (2016) tersebut mengatakan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan menurut Novitasari, Vince, and Silfi (2017) bahwa Komite Audit tidak mempengaruhi agresivitas pajak, karena

rapat dalam komite audit hanya bersifat memenuhi ketentuan formal yang berlaku dan belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara maksimal. Namun, berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanna and Haryanto (2016), menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak karena telah menjalankan fungsinya kepada manajemen perusahaan dalam melakukan agresivitas pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₃: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap tindakan Agresivitas Pajak.

2.7.4 Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Konservatisme akuntansi adalah prinsip kehati-hatian pihak manajemen perusahaan dalam mengakui laba (tidak menaikkan aktiva bersih) pada saat menanggapi *good news* serta mengakui laba (menurunkan aktiva bersih) pada saat menanggapi *bad news*. Keuntungan menangkap *bad news* lebih cepat daripada *good news* untuk standar verifikasi asimetris keuntungan dan kerugian. Akuntansi konservatif merupakan sikap yang diambil oleh akuntan dalam menghadapi dua atau lebih alternatif dalam penyusunan laporan keuangan (Sari, dkk., 2016 dalam Nurjannah. 2017).

Dalam penggunaan konservatisme akuntansi dapat berpengaruh terhadap angka yang disajikan dalam laporan keuangan terutama mengenai laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Nurjannah, 2017). Apabila angka-angka pada laporan keuangan ditetapkan rendah sehingga akan berdampak pada pajak yang akan dibayarkan wajib pajak perusahaan kepada pemerintah. Semakin rendah

pendapatan yang diperoleh (konservatif) perusahaan maka semakin rendah pajak yang akan dibayarkan sehingga tidak akan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Konservatisme akuntansi digunakan pemerintah untuk memaksimalkan pemasukan pajaknya dan meminimalkan ruang bagi wajib pajak perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau tindakan agresivitas pajak. Namun karena adanya peraturan pemerintah yang mengikat, maka wajib pajak cenderung tidak akan melakukan agresivitas pajak dan tidak dapat memanfaatkan celah untuk bertindak penggunaan pajak yang agresif. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari, dkk., (2016) dalam Nurjannah (2017), menunjukkan bahwa penggunaan metode akuntansi yang konservatis tidak akan meningkatkan kecenderungan untuk melakukan pajak yang agresif.

Sejalan dengan penelitian oleh Kurniaty (2016), konsep konservatisme akuntansi memberikan pengaruh negative terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode akuntansi dengan tingkat konservatisme rendah, maka akan menurunkan kegiatan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₄: Konservatisme Akuntansi berpengaruh negatif terhadap tindakan Agresivitas Pajak.

2.7.5 Pengaruh Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Agresivitas pelaporan keuangan dapat tercermin melalui manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan memberikan simpulan bahwa salah satunya perusahaan berusaha menyajikan laba yang tinggi untuk menarik minat investor atau pemegang saham, kreditor, *supplier* dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Laba yang tinggi mengakibatkan pembayaran pajak yang tinggi juga. Memperbesar laba bersih pada laporan keuangan akan menyebabkan *tax costs* karena beban pajak yang harus dibayar akan meningkat. Hal tersebut dapat berakibat memunculkan *trade-off* di antara keduanya. Namun menurut hasil penelitian Frank et al., (2009) dan Kamila (2014) dalam Yunistiyani dan Tahar (2016) menunjukkan bahwa *trade off* antara pajak dan pelaporan keuangan tidak selalu terjadi. Hal tersebut dapat terjadi karena memanfaatkan celah pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a, maupun menggunakan cara yang tidak diperbolehkan, sehingga perusahaan bisa merepresentasikan laba yang tinggi tanpa melakukan pembayaran pajak yang besar dan memunculkan tindakan agresivitas pajak.

Menurut Kamila dan Martani (2014) dalam Hanna and Haryanto (2016), hubungan antara agresivitas pajak dan pelaporan keuangan ialah dapat bersifat resiprokal atau dua arah. Dengan kata lain pajak dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba, begitu pula manajemen laba dapat mempengaruhi pajak yang dilakukan perusahaan. Pajak dikatakan mampu mempengaruhi manajemen laba karena salah satu upaya yang dilakukan dalam manajemen laba adalah pada pengendalian beban perusahaan. Seperti halnya jika laba yang dihasilkan rendah

maka dalam pembayaran pajak juga akan rendah bahkan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak agresif agar labanya tetap.

Hasil yang dapat disimpulkan oleh penelitian Hanna and Haryanto (2016) menunjukkan bahwa agresivitas pelaporan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yunistiyani dan Tahar (2016) mendukung adanya pengaruh agresivitas pelaporan keuangan yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₅: Agresivitas Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap tindakan Agresivitas Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah data perusahaan-persahaan yang berasal dari sector keuangan, dengan lebih spesifik ke dalam sub sector perbankan yang menerbitkan laporan keuangannya melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) pada rentang waktu 5 tahun, yaitu mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Alasan memilih perusahaan-perusahaan perbankan sebagai sampel adalah karena:

1. Perusahaan perbankan memberikan laba yang tinggi bagi pendapatan Negara dan mampu menunjukkan keadaan perusahaan perbankan di Indonesia.
2. Perusahaan yang diambil sebagai sampel adalah perusahaan yang menyajikan data, seperti konservatisme akuntansi diperoleh dari akun laba bersih, arus kas operasional, total asset dan depresiasi.

Sampel yang digunakan dengan metode *non probability sampling* melalui teknik *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode untuk menentukan sampel penelitian dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh dapat *representative* dengan kriteria yang dipilih. Sedangkan kriteria-kriteria yang dipilih untuk dijadikan sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Perbankan yang *go public* (terdaftar di BEI).
2. Perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode 2012-2016.

3. Perusahaan perbankan yang berlaba dan menerbitkan laporan tahunannya menggunakan mata uang Rupiah.
4. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data mengenai variable – variable yang akan diteliti berdasarkan periode yang ditentukan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut didapat dari laporan tahunan perusahaan – perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang di ambil melalui *webpage* <http://www.idx.co.id> pada rentang periode 2012 sampai 2016.

3.3 Variabel dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan suatu variable yang dipengaruhi oleh adanya variable independen, sedangkan perubahan pada variable dependen ini tergantung pada besarnya variable independen. Variable dependen pada penelitian ini adalah agresivitas pajak.

Menurut Frank et al., (2008) dalam Agresivitas pajak merupakan manipulasi penurunan penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak yang mungkin atau tidak dianggap sebagai kecurangan penghindaran pajak. Pada pengukuran variabelnya, agresivitas pajak dapat diukur dengan menggunakan *Book Tax Different* (BTD). BTD yaitu selisih laba sebelum pajak di laporan laba rugi dengan laba kena pajak secara fiscal. Digunakan untuk mengontrol perbedaan dalam skala perusahaan dengan laba tersebut, dan *Book Tax Different* yang dinaikkan oleh nilai

buku asset, maka *Book Tax Different* juga diskala yang membaginya dengan nilai buku asset. *Book Tax Different* (BTD) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Book Tax Different (BTD)} = \frac{\text{book income } i, t - \text{taxable income } i, t}{\text{total asset } i, t}$$

Keterangan:

- a. BTD = perhitungan untuk mengukur selisih antara laba akuntansi dan laba secara fiscal.
- b. Book Bincome i, t = pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.
- c. Taxable income i, t = pendapatan yang digunakan untuk menghitung beban pajak kini atau pendapatan sebelum pajak perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan setelah dilakukan koreksi fiscal atau laba berdasarkan pajak perusahaan i pada tahun t .
- d. Total asset = Total Aset perusahaan i pada tahun t .

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah suatu variable yang mempengaruhi atau menjadi penyebab adanya perubahan pada variable dependen. Pada penelitian ini, terdapat beberapa variable independen, diantaranya ialah factor tata kelola perusahaan yang menggunakan proksi kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit, kemudian variabel konservatisme akuntansi serta variabel agresivitas pelaporan keuangan pada perusahaan. Berikut ini adalah definisi dari masing-masing variable:

- a. Variabel Kepemilikan Manajerial

Menurut Kurniaty (2016), Kepemilikan Manajerial (KMA) adalah besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki manajer atau direksi terhadap total saham yang beredar.

b. Variable Komisaris Independen

Komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator presentase anggota dewan komisaris yang berasal dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan tersebut (Liu dan Cao, 2007, dalam Tiaras and Wijaya 2015).

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

c. Variable Komite Audit

Pada umumnya, komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal. Komite audit diukur dari jumlah komite audit, komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal (Novitasari, Vince, and Silfi, 2017).

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Komite Audit}$$

d. Variabel Konservatisme Akuntansi

Konservatisme diukur menggunakan model Givoly dan Hayn (200) dalam kurniaty (2016) yang menyatakan bahwa apabila akrual bernilai negative (-), maka laba digolongkan konservatif yang disebabkan karena laba lebih rendah dari arus kas perusahaan pada periode tertentu.

$$\text{Total Akrual} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Aliran Kas Dari Aktivitas Operasi}}$$

e. Variable agresivitas pelaporan keuangan

Agresivitas pelaporan keuangan diukur menggunakan proksi akrual diskresioner yang dihitung dengan the modified-Jones Model yang mengacu pada penelitian Ridha dan Martani (2014), Kamila (2014) dalam Yunistiyani dan Tahar (2016). Model ini menyatakan bahwa salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam menghimpun labanya adalah melalui penggunaan kebebasan atau diskresi untuk memilih metode dan estimasi akuntansi yang akan digunakan. Metode akrual dianggap tersebut metode manajemen dalam menghimpun laba yang paling sederhana. Model modified jones adalah sebagai berikut :

A. Menentukan nilai akrual dengan rumus:

$$TA_{it} = Nit - CFO_{it}$$

B. Menentukan nilai parameter $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ menggunakan Model modified jones, dengan rumus :

$$TA_{it} = \beta_1 + \beta_2 \Delta Rev_{it} + \beta_3 PPE_{it} + e$$

C. Nilai total accrual (TA) yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS untuk menskalakan data yang dibagi dengan aset sebelumnya, dengan rumus:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + e$$

D. Dengan menggunakan koefisien regresi di atas nilai non discretionary accruals (NDA) dapat dihitung dengan rumus:

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta Rect_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

E. Selanjutnya discretionary accruals (DA) dapat dihitung sebagai berikut:

$$DAit = \frac{TAit}{Ait - 1} - NDAit$$

Keterangan :

DAit = Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t

NDAit = Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t

TAit = Total akrual perusahaan i pada periode ke t

Nit = Laba bersih perusahaan i pada periode ke t

CFOit = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i periode ke-t

Ait-1 = Total aset perusahaan i pada periode ke t-1

ΔRev_t = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t

PPEt = Aset tetap perusahaan pada periode ke t

ΔRec_t = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t

e = error

3.3.3 Variabel Kontrol

3.3.3.1 Profitabilitas

Profitabilitas dapat diukur dengan *Return on Equity* (ROE), sedangkan ROE adalah salah satu rasio keuangan yang sering digunakan oleh investor untuk menganalisis saham. ROE menunjukkan tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba dari dana yang diinvestasikan pemegang saham. Semakin tinggi ROE, semakin besar laba yang dihasilkan dari sejumlah dana yang diinvestasikan sehingga mencerminkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Pada umumnya, ROE ini dihitung untuk pemegang saham biasa (*common shareholders*). Dalam hal ini, dividen preferen tidak termasuk dalam perhitungan karena jenis dividen ini tidak tersedia untuk para pemegang saham biasa. Rasio *Return on Equity* (ROE) dihitung dengan membagi laba bersih dengan

ekuitas pemegang saham (www.ilmumanajemenindustri.com, 2017). Berikut ini adalah Rumus ROE :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

3.4 Alat Statistik

3.4.1 Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model *Generalized Linear Model* (GLM), yang bertujuan untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen yaitu variabel-variabel dalam tata kelola perusahaan, variabel konservatisme akuntansi, dan variabel agresivitas pelaporan keuangan dengan variabel dependen yaitu agresivitas pajak, apakah masing-masing variabel tersebut dapat saling berhubungan positif atau negatif.

3.4.2 Uji Statistik Hipotesa

Pengujian statistik hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model *Generalized Linear Model* (GLM), sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 KM + \beta_2 KI + \beta_3 KA + \beta_4 KAK + \beta_5 APK + \beta_6 ROE + e \dots \dots \dots 3.1$$

Keterangan :

- Y : Agresivitas Pajak
- α : Konstanta regresi
- KM : Kepemilikan Manajerial
- KI : Komisaris Independen
- KA : Komite Audit
- KAK : Konservatisme Akuntansi
- APK : Agresivitas Pelaporan Keuangan
- ROE : *Return On Equity*
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$: Koefisien variable independen

e : error

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan $\alpha = 5\%$.

Sehingga, penentuan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas (sig) $< \alpha = 5\%$, maka hipotesis alternative didukung.
2. Jika nilai probabilitas (sig) $> \alpha = 5\%$, maka hipotesis alternative tidak didukung.

3.4.3 Hipotesa Operasional

1. Kepemilikan Manajerial

$H_{01}; \beta_1 \leq 0$: Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

$H_{A1}; \beta_1 > 0$: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

2. Komisaris Independen

$H_{02}; \beta_2 \leq 0$: Komisaris Independen tidak berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak

$H_{A2}; \beta_2 > 0$: Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak.

3. Komite Audit

$H_{03}; \beta_3 \leq 0$: Komite Audit tidak berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

$H_{A3}; \beta_3 > 0$: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

4. Konservatisme Akuntansi

$H_{04}; \beta_4 \leq 0$:Konservatisme Akuntansi tidak berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

$H_{A4}; \beta_4 > 0$:Konservatisme Akuntansi berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak.

5. Agresivitas Pelaporan Keuangan

$H_{05}; \beta_5 \leq 0$:Agresivitas Pelaporan Keuangan tidak berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak.

$H_{A5}; \beta_5 > 0$:Agresivitas Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan pada perusahaan perbankan selama periode 2012-2016, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan atau website resmi dari masing-masing perusahaan. Terdapat 43 perusahaan sektor perbankan yang terdaftar. Melalui metode purposive sampling, diperoleh 33 perusahaan terpilih yang dapat digunakan, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan.

Tabel 4.1

Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan Perbankan Umum yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016	43
2.	Perusahaan Perbankan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan di BEI tahun 2012-2016	(2)
3.	Perusahaan Perbankan yang tidak memiliki kelengkapan data seperti komite audit, dewan komisaris dan kepemilikan saham manajerial yang dibutuhkan selama tahun 2012-2015	(8)
	<i>Jumlah Perusahaan Sampel</i>	33
	<i>Jumlah pengamatan (Jumlah sampel x 5 tahun penelitian)</i>	165
	<i>Sampel yang tidak digunakan (data outlier)</i>	(37)
	<i>Sampel yang digunakan</i>	128

Sumber : Hasil penelitian, 2018

4.2 Statistika Deskriptif

Statistik deskriptif tersebut memberikan gambaran atau deskripsi data yang berasal dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness atau kemencengan distribusi (Ghozali, 2011). Penelitian berikut adalah hasil dari analisis deskriptif yang terdiri dari Komisaris Independen (KI), Komite Audit (KA), Kepemilikan Manajerial (KM), Konservatisme Akuntansi (KAK), Agresivitas Pelaporan Keuangan (APK) dan Return On Equity (ROE) dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif

	KI	KA	KM	KAK	APK	ROE
Mean	0.564205	3.937500	0.743686	0.421875	-19.73764	0.080155
Median	0.571429	3.000000	0.001835	0.000000	-0.008170	0.091605
Maximum	1.000000	8.000000	28.52001	1.000000	1.198349	0.348173
Minimum	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	-189.6295	-1.065951
Std. Dev.	0.152353	1.215063	4.159110	0.495799	46.94729	0.170912
Skewness	-1.482175	1.230266	5.924549	0.316386	-2.382796	-3.931418
Kurtosis	8.806007	3.806187	37.38150	1.100100	7.387230	23.29261

Sumber : *Eviews9*, 2018

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

Rata-rata (*Mean*), Komisaris Independen (KI) pada sektor perbankan umum adalah sebesar 0.564205. Berdasarkan nilai rata-rata (mean) tersebut perusahaan

perbankan dalam melakukan tindak Agresifitas Pajak yang diukur menggunakan KI juga sebesar 0.564205. Nilai tengah (Median) dari KI yaitu sebesar 0.571429. kemudian Nilai Standar Deviasi atau persebaran data sebesar 0.152353 menunjukkan bahwa data tidak tersebar. Nilai tertinggi pada data sebesar 1.000000. Sedangkan nilai terendah pada data sebesar 0.000000.

Rata-rata (*Mean*), Komite Audit (KA) pada sektor perbankan umum adalah sebesar 3.937500. Berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) tersebut perusahaan perbankan dalam melakukan tindak Agresifitas Pajak yang diukur menggunakan KA juga sebesar 3.937500. Nilai tengah (Median) dari KA yaitu sebesar 3.000000. kemudian Nilai Standar Deviasi atau persebaran data sebesar 1.215063 menunjukkan bahwa data tidak tersebar. Nilai tertinggi pada data sebesar 8.000000. Sedangkan nilai terendah pada data sebesar 3.000000.

Rata-rata (*Mean*), Kepemilikan Manajerial (KM) pada sektor perbankan umum adalah sebesar 0.743686. Berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) tersebut perusahaan perbankan dalam melakukan tindak Agresifitas Pajak yang diukur menggunakan KM juga sebesar 0.743686. Nilai tengah (Median) dari KM yaitu sebesar 0.001835. Kemudian Nilai Standar Deviasi atau persebaran datanya sebesar 4.159110 yang menunjukkan bahwa data tidak tersebar. Nilai tertinggi pada data sebesar 28.52001, yaitu pada perusahaan Bank Capital Indonesia tahun 2013-2014. Sedangkan nilai terendah pada data sebesar 0.000000, yang ditujukan pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (2012), Bank Artos Indonesia (2012-2016), Bank MNC Internasional (2012-2013), Bank Negara Indonesia (2016), Bank

Nusantara Parahyangan (2012), Bank J Trust Indonesia (2012,2014,2015,2016), Bank Pembangunan Daerah Banten (2013-2014)

Rata-rata (*Mean*), Konservatisme Akuntansi (KAK) pada sektor perbankan umum adalah sebesar 0.421875. Berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) tersebut perusahaan perbankan dalam melakukan tindak Agresifitas Pajak yang diukur menggunakan KAK juga sebesar 0.421875. Nilai tengah (Median) dari KAK yaitu sebesar 0.000000. Kemudian Nilai Standar Deviasi atau persebaran datanya sebesar 0.495799 yang menunjukkan bahwa data tidak tersebar. Nilai tertinggi pada data sebesar 1.000000. Sedangkan nilai terendah pada data sebesar 0.000000.

Rata-rata (*Mean*), Agresivitas Pelaporan Keuangan (APK) pada sektor perbankan umum adalah sebesar -19.73764. Berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) tersebut perusahaan perbankan dalam melakukan tindak Agresifitas Pajak yang diukur menggunakan APK juga sebesar -19.73764. Nilai tengah (Median) dari APK yaitu sebesar -0.008170. Kemudian Nilai Standar Deviasi atau persebaran datanya sebesar 46.94729 yang menunjukkan bahwa data tidak tersebar. Nilai tertinggi pada data sebesar 1.198349. Sedangkan nilai terendah pada data sebesar -189.6295.

Rata-rata (*Mean*), Return On Equity (ROE) pada sektor perbankan umum adalah sebesar 0.080155. Berdasarkan nilai rata-rata (*mean*) tersebut perusahaan perbankan dalam melakukan tindak Agresifitas Pajak yang diukur menggunakan APK juga sebesar 0.080155. Nilai tengah (Median) dari APK yaitu sebesar 0.091605. Kemudian Nilai Standar Deviasi atau persebaran datanya sebesar 0.170912 yang menunjukkan bahwa data tidak tersebar. Nilai tertinggi pada data sebesar 0.348173. Sedangkan nilai terendah pada data sebesar -1.065951.

4.3 Analisis Korelasi

Korelasi merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk mengukur adanya hubungan linier antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dua variabel yang berkorelasi akan saling mempengaruhi sehingga apabila terjadi perubahan pada satu variabel maka akan diikuti oleh perubahan variabel lain, baik dengan arah sama maupun berlawanan. Berikut adalah hasil uji korelasi hubungan antar variabel.

Tabel 4.3

Hasil Uji Korelasi

	KI	KA	KM	KAK	APK	ROE
KI	1.000000	0.030372	0.120373	-0.013114	-0.013272	-0.016681
KA	0.030372	1.000000	-0.132933	0.083324	0.002143	0.058026
KM	0.120373	-0.132933	1.000000	-0.014432	0.059064	-0.007164
KAK	-0.013114	0.083324	-0.014432	1.000000	-0.016412	0.005056
APK	-0.013272	0.002143	0.059064	-0.016412	1.000000	-0.191503
ROE	-0.016681	0.058026	-0.007164	0.005056	-0.191503	1.000000

Sumber : Eviews 9, 2018

Dari tabel Hasil Uji Korelasi diatas dapat diketahui bahwa variabel KI memiliki arah yang sama atau korelasi positif dengan KA sebesar 0.030372 dan KM sebesar 0.120373. Selain itu variabel KI juga memiliki korelasi yang berlawanan atau korelasi negatif dengan KAK sebesar -0.013114, APK sebesar -0.013272, serta ROE sebesar -0.016681.

Variabel KA memiliki korelasi positif dengan variabel KI sebesar 0.030372, variabel KAK sebesar 0.083324, variabel APK sebesar 0.002143, kemudian

variabel ROE sebesar 0.058026. Sedangkan variabel KM memiliki korelasi negatif yaitu sebesar -0.132933.

Variabel KM memiliki korelasi sama atau korelasi positif dengan variabel KI sebesar 0.120373, serta variabel APK sebesar 0.059064. Sedangkan hubungan berlawanan atau korelasi negatif pada variabel KM yaitu dengan variabel KA sebesar -0.132933, variabel KAK sebesar -0.014432, dan variabel ROE sebesar -0.007164.

Variabel KAK memiliki korelasi positif dengan variabel-variabel berikut ini yaitu variabel KA sebesar 0.083324 dan variabel ROE sebesar 0.005056. Sedangkan korelasi negatif yang berhubungan dengan variabel KAK yaitu variabel KI sebesar -0.013114, variabel KM sebesar -0.014432 serta variabel APK sebesar -0.016412.

Variabel APK telah memiliki korelasi positif dengan berbagai variabel berikut diantaranya dengan variabel KA sebesar 0.002143, serta variabel KM sebesar 0.059064. namun terdapat korelasi negatif pada variabel APK diantaranya dengan variabel KI sebesar -0.013272, variabel KAK sebesar -0.016412, dan variabel ROE sebesar -0.191503.

Variabel ROE memiliki korelasi positif dengan variabel KA sebesar 0.058026 dan variabel KAK sebesar 0.005056. Sedangkan variabel ROE memiliki korelasi negatif dengan variabel KI sebesar -0.016681, variabel KM sebesar -0.007164, serta variabel APK sebesar -0.191503.

4.4 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat statistik *Generalized Linear Model (GLM)*, yaitu model linear untuk mengetahui pengaruh perubahan suatu nilai berdasarkan faktor. Menurut Singgih (2016) dalam penggunaan GLM dilakukan sebagai metode yang membentuk model yang data dependennya tidak dapat terdistribusi secara normal. Atau data observasinya tidak terdistribusi normal, sehingga mulai menggunakan bentuk/model yang lebih khusus dari regresi linear. Faktor yang dapat mempengaruhi variabel dependen adalah berupa sekumpulan sampel yang dapat dikelompokkan. Oleh karena itu diperoleh hasil penelitian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4

Hasil Generalized Linear Model

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.008856	0.004496	-1.969591	0.0489
KM	0.000112	5.12E-05	2.182572	0.0291
KI	-0.006303	0.008745	-0.720741	0.4711
KA	0.001425	0.000138	10.31917	0.0000
KAk	0.005774	0.002172	2.657981	0.0079
APK	-0.023505	0.011514	-2.041387	0.0412
ROE	0.053035	0.005260	10.08278	0.0000

Sumber : Eviews9, 2018

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4.4 diatas, pengaruh tata kelola perusahaan yang menggunakan proksi kepemilikan manajerial, komisaris

independen, dan komite audit terhadap tindakan agresivitas pajak secara statistik tidak membuktikan hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan berlawanan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif, kemudian komisaris independen tidak berpengaruh dan komite audit berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing proksi :

4.5.1.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis pada tabel 4.4 diatas, bahwa Kepemilikan Manajerial (KM) yang dapat diukur melalui rasio antara jumlah saham yang dimiliki oleh direksi, komisaris maupun karyawan dibagi dengan total saham yang beredar (Kurniaty, 2016). Sehingga dalam penelitian ini diperoleh hasil yang menjelaskan bahwa nilai coefficient sebesar 0.000112. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa nilai koefisien beta KM sebesar 0.000112 dan dapat menjelaskan LTD sebesar 0.0112% atau dapat diartikan bahwa setiap perubahan satuan KM dapat mengakibatkan perubahan pada LTD sebesar 0.0112%. Selain itu diperoleh hasil bahwa KM memiliki z-statistic sebesar 2.182572 dengan p-value sebesar 0.0291 (<0.05). Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif signifikan atau berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Maka dari itu diartikan bahwa H_1 yang mengharapkan KM berpengaruh negatif terhadap Agresivitas pajak tidak terbukti dalam penelitian ini atau tidak didukung secara statistik oleh hasil.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara Kepemilikan Manajerial dengan tindakan agresivitas pajak yang dapat mengindikasikan semakin besar kepemilikan saham manajerial maka semakin tinggi nilai LTD, atau

manajerial semakin leluasa dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan besarnya kepemilikan manajerial dengan rata-rata 74.37%. Kepemilikan manajerial tersebut diindikasikan adanya upaya untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham manajerial. Selain itu kepemilikan saham perusahaan oleh manajerial akan mencari potensi meningkatkan bonus dan dividen daripada keputusan manajerial untuk kepentingan perusahaan yang dapat menimbulkan tindakan agresivitas pajak (Mangoting & Hadi, 2014). Hal tersebut dapat terjadi karena adanya peran ganda antara manajerial (agen) dan pemegang saham (prinsipal) atau dengan kata lain manajer perusahaan memiliki saham perusahaan dan cenderung akan memuaskan diri, yang nantinya dapat menimbulkan *agency problem* (konflik kepentingan) karena adanya perbedaan kepentingan antara manajerial dan prinsipal. Kemudian, menurut penelitian Chen *et al.* (2010) dalam Hartadinata and Tjaraka (2013), kondisi perusahaan non keluarga akan memiliki tingkat agresivitas pajak tinggi, karena permasalahan keagenan lebih banyak berlangsung pada perusahaan non keluarga. Pada penelitian ini terdapat perusahaan keluarga salah satunya yaitu Bank Mega, Tbk.

Adanya keterlibatan manajemen dalam kepemilikan saham cukup berpengaruh, meskipun sudah dipisahkan antara kepemilikan manajerial yang ada di dalam perusahaan tersebut dan di luar perusahaan tersebut. Oleh karena itu pemilik saham manajerial dapat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan meski kepemilikan sahamnya lebih rendah dibanding investor lain atau ada indikasi untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham, karena pada akhirnya manajemen akan ikut merasakan manfaat baik secara langsung maupun tidak

langsung terhadap keputusan yang diambil untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham (Hartadinata and Tjaraka 2013).

Penelitian ini mendukung penelitian dari Boussaidi (2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki efek positif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniaty (2016) dan Mangoting & Hadi (2014) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan manufaktur di Indonesia rata-rata kepemilikannya saham manajerialnya sangat rendah, yaitu berkisar kurang dari 5%. Sehingga manajerial ada kecenderungan tidak dapat mempengaruhi keputusan yang diambil dalam melakukan tindakan agresivitas pajak.

4.5.1.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Pada penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui pada table 4.4 bahwa Komisaris Independen (KI) diperoleh hasil bahwa nilai coefficient sebesar -0.006303. Hal ini menunjukkan koefisien beta KI sebesar -0.006303 yang dapat menjelaskan BTD sebesar -0.6303% atau dapat diartikan sebagai setiap perubahan satu satuan KM dapat mengakibatkan perubahan BTD sebesar -0.6303%, kemudian dihasilkan juga z-statistic sebesar -0.720741 dengan p-value sebesar 0.4711 (>0.05). Hal tersebut menunjukkan bahwa KI tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Sehingga dapat diartikan H_2 variabel Komisaris Independen yang diharapkan dapat berpengaruh positif tidak terbukti dalam penelitian atau tidak mendukung penelitian ini.

Hasil menunjukkan adanya kecenderungan semakin besar rasio komisaris independen maka tindakan agresivitas pajak tidak akan berpengaruh. Hal ini kemungkinan dapat terjadi karena komisaris independen belum mampu bersikap kooperatif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja operasional perusahaan tersebut. Hanya secara formalitas dilakukan. Pengawasan yang semakin intensif dari komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan perpajakan dan dapat meningkatkan transparansi perusahaan sehingga dapat terhindar dari tindakan agresivitas pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa komisaris independen tidak dapat secara proaktif mendorong manajemen dalam mematuhi perundangan pajak (Tiaras and Wijaya, 2015).

Semakin banyaknya jumlah komisaris independen dengan rata-rata 56.40%, koordinasi untuk pengambilan keputusan juga tidak mudah karena pendapat yang bermacam-macam, sehingga komisaris independen dapat berbuat curang. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan fungsi seharusnya yang dilakukan oleh komisaris independen untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap kepemilikan saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Sehingga keberadaan komisaris independen pada suatu manajemen dapat meningkatkan integritas dari laporan keuangan (Mayangsari (2003) dalam Wijayanti, Wijayanti dan Chomsatu (2016)).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Wijayanti, Wijayanti dan Chomsatu (2016), Tiaras and Wijaya (2015), dan Hanna and Haryanto (2016) yang menemukan hasil bahwa kenaikan komisaris independen terhadap total dewan

komisaris tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam menerapkan *good corporate governance* adanya informasi yang akurat, tepat waktu dan transparan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja operasional manajemen tidak mempengaruhi manajemen dalam tindakan agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian dari Novitasari, Vince, and Silfi (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak, karena adanya kepentingan untuk memuaskan diri dengan meningkatkan laba dan mengurangi beban pajak.

4.5.1.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui pada table 4.4, bahwa Komite Audit (KA) memiliki nilai coefficient sebesar 0.001425. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien beta KA sebesar 0.001425 dapat menjelaskan BTD sebesar 0.1425% atau dapat diartikan sebagai setiap perubahan satu satuan KA dapat mengakibatkan perubahan BTD sebesar 0.1425%, selanjutnya diperoleh hasil z-statistic sebesar 10.31917 dengan p-value sebesar 0.0000 (<0.05). Hal ini menunjukkan bahwa KA berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa H_3 variabel Komite Audit yang diharapkan dapat berpengaruh negatif, namun tidak terbukti dalam penelitian atau tidak mendukung penelitian ini.

Hal tersebut mengindikasikan adanya pengaruh jumlah komite audit yang rendah berkisar rerata 39.35% dalam perusahaan tersebut, sehingga dapat menunjukkan semakin besar tindakan pajak agresif yang akan dilakukan. Meski

Komite Audit dapat menunjukkan fungsinya dalam melakukan pengawasan namun tidak efektif karena tergolong rendah jumlahnya, terhadap keandalan laporan keuangan serta komite audit telah dianggap mampu berkomitmen dalam prakteknya untuk mendorong manajemen menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* untuk pemaksimalan laba yang terjadi dapat berindikasi memberikan celah bagi komite audit untuk berbuat kecurangan dengan mendorong efisiensi beban pajak yang dibayarkan hingga berakibat pada tindakan pembayaran pajak yang agresif (Midiastuty and Putri, 2016).

Menurut teori agensi, asimetri informasi atau ketimpangan informasi dapat terjadi jika agen atau yang dimaksud salah satunya adalah komite audit tidak bertanggung jawab dalam menjaga kualitas dan independensi komite audit itu sendiri yang ditujukan untuk pengelolaan manajemen kepada para pemegang saham agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga komite audit dianggap telah memaksimalkan beban pajak yang agresif (Putranti and Setiawanta 2015).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Hanna dan Haryanto (2016), Midiastuty and Putri (2016), serta Putranti and Setiawanta (2015) yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, karena jumlah komite audit yang sedikit dalam suatu perusahaan dengan batas minimal 3 sesuai aturan BEI maka akan meningkatkan indikasi melakukan tindakan agresivitas pajak. Sedangkan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, Wijayanti dan Chomsatu (2016) dan Yunistiyani dan Tahar (2017) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, karena dianggap tidak mampu mengontrol tindakan dalam

manajemen, hanya bersifat memenuhi ketentuan formal yang berlaku dan belum melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya.

4.5.2 Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui pada table 4.4 bahwa variabel Konservatisme Akuntansi (KAK) memiliki nilai coefficient sebesar 0.005774. Hal tersebut menunjukkan bahwa koefisien beta KAK sebesar 0.005774 dapat menjelaskan BTD sebesar 0.5774% atau dapat diartikan sebagai setiap perubahan satu satuan KAK dapat mengakibatkan perubahan BTD sebesar 0.5774%, selanjutnya diperoleh hasil z-statistic sebesar 2.657981 dengan p-value sebesar 0.0079 (<0.05). Hal tersebut menunjukkan bahwa KAK berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa H_4 variabel Konservatisme Akuntansi (KAK) yang diharapkan dapat berpengaruh negatif dapat tidak terbukti dalam penelitian atau tidak mendukung penelitian ini.

Dalam penelitian ini arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa penurunan variabel konservatisme akuntansi dapat meningkatkan nilai *book tax different*. Sehingga dapat diartikan bahwa laba yang tergolong tidak konservatis atau menunda mengakui kerugian dan segera mengakui labanya dengan menyatakan laba tinggi dari arus kas perusahaan di tiap periode tertentu pada perusahaan perbankan umum yang terdaftar di BEI maka dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Dengan adanya penundaan pengakuan penghasilan dan

mempercepat pengakuan biaya dapat menurunkan besarnya pendapatan kena pajak, sehingga dapat menunda pembayaran pajak (Dwimulyani 2010).

Terdapat beberapa perbedaan antara peraturan perpajakan dan Standar Keuangan Akuntansi (SAK) sehingga menyebabkan pengakuan pendapatan dan beban menurut peraturan perpajakan dan SAK juga ikut berbeda. Adanya kepentingan yang berlawanan antara perusahaan dan pihak fiskus yang dapat mempengaruhi perhitungan pajak tersebut. Hal ini dapat menyebabkan manajemen dengan berbagai cara menekan pajak yang harus dibayarkan kepada Pemerintah hingga berujung pada tindakan agresivitas pajak. Sejalan dengan teori akuntansi positif, menurut Sartika, (2016) tentang adanya perbedaan mekanisme dalam perhitungan laba. Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal dapat dipengaruhi oleh pemilihan metode akuntansi dalam proses akrual.

Pemerintah Indonesia menggunakan prinsip konservatisme untuk memaksimalkan pemasukan pajaknya dalam berbagai kebijakan pemerintah, seperti hanya khusus diperkenankan cadangan piutang pada perusahaan perbankan. Kemudian menggunakan metode harga perolehan secara rata-rata dengan cara FIFO atau metode rata-rata tertimbang dan bukan cara LIFO untuk menilai persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok, sesuai dengan UU PPh No 36 Tahun 2008 (Kurniaty, 2016). Maka dari itu adanya sikap tidak konservatif terhadap Peraturan Pemerintah terhadap perpajakan dalam penyusunan laporan keuangan dapat mengakibatkan tindakan agresivitas pajak bagi perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Pramdito dan Ratnasari (2015), Sari (2015) dalam Kurniaty (2016). Hal tersebut dapat terjadi karena tarif PPh Badan menurut PPh pasal 17 ayat 1 huruf b adalah tarif tunggal 28% berlaku tahun 2009, kemudian diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010 yang berlaku seterusnya. Sehingga penurunan tarif tersebut, dapat diindikasikan perusahaan tidak konservatif dalam pencatatan akuntansinya, dan berakhir pada meminimalan pembayaran pajak, oleh sebab itu dengan sendirinya perusahaan mendapatkan dana tambahan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Kurniaty (2016) dan Nurjannah (2017) yang menyatakan adanya pengaruh negatif variabel konservatisme akuntansi terhadap tindakan agresivitas pajak, yang disebabkan karena adanya laba rendah yang menunjukkan adanya penggunaan metode akuntansi yang konservatis sehingga cenderung mengurangi agresivitas pajak.

4.5.3 Pengaruh Agresivitas Pelaporan Keuangan terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Pada pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui pada table 4.5 bahwa variabel Agresivitas Pelaporan Keuangan (APK) diperoleh hasil bahwa nilai coefficient sebesar -0.023505. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien beta pada APK sebesar -0.023505 yang kemudian dapat menjelaskan LTD sebesar -2.3505% atau dapat diartikan sebagai setiap perubahan satu satuan APK dapat mengakibatkan perubahan LTD sebesar -2.3505%. Kemudian dihasilkan juga z-statistic sebesar -2.041387 dengan p-value sebesar 0.0412 (<0.05). Hal tersebut menunjukkan bahwa APK berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. Sehingga dapat diartikan H_5 variabel Agresivitas Pelaporan Keuangan yang diharapkan dapat

berpengaruh positif dapat tidak terbukti dalam penelitian atau tidak mendukung penelitian ini.

Hal tersebut kemungkinan dapat terjadi karena perusahaan berusaha untuk menyajikan laba yang tinggi agar menarik bagi investor, akan tetapi kenyataannya banyak perusahaan yang menyajikan laba rendah bahkan rugi sehingga tidak dapat memaksimalkan laba dan tetap membayar beban pajak yang tinggi. Sehingga mengindikasikan bahwa adanya *trade off* dalam keputusan antara agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak. Menurut Douglas A. Schackelford (2001) dalam Nurhandono and Firmansyah (2012) adanya *trade off* terjadi karena agresivitas pajak adalah aktivitas yang menurunkan laba sedangkan pelaporan keuangan agresif seperti aktivitas manajemen laba adalah aktivitas yang cenderung meningkatkan laba. Sehingga kedua aktivitas tersebut tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan. Penelitian ini membuktikan adanya *trade off* tersebut, sehingga agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak tidak dapat dilakukan bersamaan. Dalam laporan keuangan tahunan perbankan yang telah diteliti, peneliti menemukan penyajian laba yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Banyak perusahaan perbankan yang menyajikan kerugian seperti halnya Bank J Trust Indonesia Tbk (2013-2016), Bank MNC Internasional Tbk (2013-2014), Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (2014-2016), Bank Permata Tbk, Bank QNB Indonesia Tbk, serta Bank Artos Indonesia Tbk. Sehingga semakin rendah laba dalam tindakan agresivitas pelaporan keuangan yang dilakukan, maka semakin rendah juga tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut. Perusahaan dengan tingkat laba yang rendah atau merugi akan cenderung melakukan manajemen pajak

dengan memanipulasi beban pajak yang akan dibayar guna memperlihatkan posisi keuangan yang lebih baik (Kamila 2014).

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017). Salah satu motivasi melakukan pelaporan keuangan yang agresif adalah motivasi untuk pembayaran beban pajak, nilai laba yang dinyatakan perusahaan setelah melakukan *income decreasing* dan dapat berpengaruh negatif terhadap pembayaran pajak yang agresif. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunistiyani dan Tahar (2017) dan Kamila (2014) yang menyatakan bahwa adanya hubungan signifikan antara tindakan agresivitas pelaporan keuangan dengan agresivitas pajak. Hal ini dapat terjadi karena adanya indikasi dalam melakukan manajemen pajak dengan memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan maupun aturan akuntansi untuk aktivitas ilegal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan sebagai jawaban atas hasil-hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dan perbedaan perhitungan antar peneliti mengenai tindakan agresivitas pajak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan pengaruh variabel tata kelola perusahaan, konservatisme akuntansi dan agresivitas pelaporan keuangan terhadap tindakan agresivitas pajak. Dimana tata kelola perusahaan merupakan variabel inkonsisten pada penelitian sebelumnya, sedangkan konservatisme akuntansi dan agresivitas pelaporan keuangan merupakan variabel yang dikembangkan, dan profitabilitas adalah variabel kontrol yang digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini terjadi ketika kepemilikan saham pada manajemen tinggi, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

2. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak.
3. Komite Audit berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini terjadi karena adanya jumlah komite audit yang tinggi maka pengambilan keputusan dalam melakukan tindak agresivitas pajak juga dapat terjadi.
4. Konservatisme Akuntansi berpengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap tidak konservatif perpajakan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga mengakibatkan tindakan agresivitas pajak bagi perusahaan.
5. Agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak. Hal ini terjadi karena semakin rendah laba dalam tindakan agresivitas pelaporan keuangan yang dilakukan, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat sebagai referensi dan pengembangan teori mengenai tindakan agresivitas pajak, dimana penelitian ini dapat berkontribusi dalam menambah pengetahuan dan bukti empiris yang berkaitan dengan pengaruh kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen yang dikembangkan dari penelitian Boussaidi (2015),

Tiaras and Wijaya (2015), Yunistiyani dan Tahar (2016), Abdullah (2016), Novitasari, dan Vince, and Silfi (2017), selanjutnya konservatisme akuntansi yang dikembangkan dari penelitian Kurniaty (2016) dan agresivitas pelaporan keuangan yang dikembangkan dari penelitian Hanna and Haryanto (2016) dan Yunistiyani dan Tahar (2016) terhadap agresivitas pajak, sehingga jika terdapat penelitian serupa pada masa yang akan datang, penelitian ini dapat memperkaya pengembangan bagi penelitian selanjutnya. Meskipun penelitian ini belum membuktikan dan menjawab hipotesis yang telah dijelaskan, namun penelitian ini dapat memberikan analisis mengenai faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, yang secara signifikan telah mempengaruhi dan tidak mempengaruhi tindakan agresivitas pajak tersebut.

Penelitian ini menolak hipotesis, akan tetapi dapat membuktikan signifikansi terhadap kepemilikan manajerial, komite audit dan konservatisme akuntansi yang berpengaruh positif, serta agresivitas pelaporan keuangan yang berpengaruh negatif terhadap tindakan agresivitas pajak. Selanjutnya faktor komisaris independen yang tidak mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Dalam penelitian ini telah menggunakan pengujian *Generalized Linear Model* (GLM), yang diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan dalam menyajikan hasil mengenai tindakan agresivitas pajak. Meskipun penelitian ini tidak mampu membuktikan hipotesis, namun penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan literatur dan ilmu akuntansi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian.

2. Berdasarkan penelitian ini diharapkan bagi perusahaan khususnya sektor perbankan atau sederajat agar dapat meningkatkan perhatiannya untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan agar terhindar dari tindakan agresivitas pajak. Terlebih dengan pengelolaan faktor tata kelola perusahaan untuk lebih diperhatikan dan diterapkan dengan baik, seperti penerapan kepemilikan manajerial yang benar karena jika tidak akan secara positif mempengaruhi tindakan agresivitas pajak yang mendukung penelitian Boussaidi (2015), dimana semakin besar kepemilikan manajerial suatu perusahaan maka diindikasikan dapat melakukan tindakan agresivitas pajak.

Kemudian faktor komite audit yang sejalan dengan penelitian Hanna dan Haryanto (2016), Midiastuty and Putri (2016), dan Putranti and Setiawanta (2015) dapat secara positif mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, karena dengan adanya jumlah komite dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam melakukan penghindaran pembayaran pajak yang agresif. Selanjutnya memperhatikan faktor konservatisme akuntansi yang terjadi dalam pengambilan keputusan mengenai manajemen laba yang dilakukan. Namun penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan yang tidak konservatif akan mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, dan sejalan dengan penelitian oleh Pramdito dan Ratnasari (2015), dan Sari (2015). Agresivitas pelaporan keuangan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan sejalan dengan penelitian oleh Saputra (2017), hal ini terjadi bahwa dalam menghasilkan laba perusahaan perlu memperhatikan laba yang

diperoleh, agar perusahaan mampu membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku meski dengan manajemen laba yang sewajarnya.

Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan mampu memperhatikan faktor-faktor terkait yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, sehingga baik dari segi pemerintah maupun dari perusahaan sendiri dapat saling menguntungkan dengan adanya aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Berikut ini merupakan keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Indikator yang digunakan dalam mengukur tata kelola perusahaan pada penelitian ini hanya terbatas pada kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit. Sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah proksi dalam tata kelola perusahaan, seperti struktur kepemilikan sebagai contoh kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional. Agar pengawasan terhadap kinerja operasional lebih dapat diperhatikan dan lebih besar pengaruhnya untuk pengurangan tindakan agresivitas pajak.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sektor selain sektor perbankan, seperti halnya sektor real estate, sektor pertambangan dsb, agar dapat lebih merepresentasikan tindakan agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Toyib. 2016. "Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak." Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Adisamartha, Ida Bagus Putu Fajar, and Naniek Noviari. 2015. "Pengaruh Likuiditas, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13(3):973-1000.
- Boussaidi, Ahmed. 2015. "The Impact Of Governance Mechanisms On Tax Aggressiveness: Empirical Evidence From Tunisian Context 2 . Tax Aggressiveness: Lighting And Distinction" *Journal of Asian Business Strategy* 5 (1): 1–13.
- Hartadinata, Okta S, and Heru Tjaraka. 2013. "Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2008-2010." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, no. 3: 48–59.
- Kamila, Putri Almainda. 2014. "Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan Dan Agresivitas Pajak." *Finance and Banking Journal* 16 (2): 228–45.
- Hanna, and Melinda Haryanto. 2016. "Agresivitas Pelaporan Keuangan, Agresivitas Pajak, Tata Kelola Perusahaan Dan Kepemilikan Keluarga" *Jurnal Akuntansi XX* (3): 407–419.
- Nurjannah. 2017. "Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Modal (*Capital Intensity*) Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI)." Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Katadata. 2016. " APBN 2017, Pendapatan Negara Masih Andalkan Pajak." Diakses 18 Februari. <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/20/apbn-2017-pendapatan-negara-masih-andalkan-pajak>.
- Kurniaty. 2016. "Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Aggesive Tax Avoidance." *Universitas Tanjungpura*, no. 11: 1–20.
- Lanis, Roman, and Grant Richardson. 2013. "Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory" 26 (1): 75–100. <https://doi.org/10.1108/09513571311285621>.
- Lanis, Roman, Grant Richardson, Grantley Taylor, and Grant Richardson. 2017. "Board of Director Gender and Corporate Tax Aggressiveness : An Empirical Analysis." *Journal of Business Ethics* 144 (3). Springer Netherlands: 577–96. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2815-x>.
- Larasati, Bening. 2017. "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (*Tax Avoidance*)". Skripsi. Universitas Islam Indonesia

- Luke and Zulaikha. 2016. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak." *Jurnal Akuntansi & Auditing* 13 (1): 80–96.
- Mangoting and Hadi. 2014. "Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak" *Tax and Accounting Review* 4 (2): 1–10.
- Midiastuty, Pratana Puspa, and Sarry Irawati Putri. 2016. "Pengaruh Kepemilikan Pengendali Dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif." *Simposium Nasional Akuntansi XIX. Lampung.*
- Novitasari, Shelly. 2017. "Pengaruh Manajemen Laba, *Corporate Governance*, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014)" *JOM Fekon* Vol.4 (1): 1901-1914.
- Nurhandono, Furqon, and Amrie Firmansyah. 2017. "Pengaruh Lindung Nilai, Financial Leverage, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak," *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 17 (1): 31–52.
- Octaviana, Natasya Elma. 2014. "Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap *Corporate Social Responsibility* : Untuk Menguji Teori Legitimasi." Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Praditya, Ilyas Istianur. 2018. " Pengamat: Penerimaan Pajak 2017 Sudah Optimal." Diakses 18 Februari. <http://bisnis.liputan6.com/read/3217288/pengamat-penerimaan-pajak-2017-sudah-optimal>.
- Putranti, Anissa Setiawati, and Yulita Setiawanta. 2015. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* Vol. 8 (2): 1–14.
- Ratmono, Dwi and Winarti Monika Sagala. 2015. "Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak." *Jurnal Nominal* Vol. IV (2): 16-30.
- Ridha dan Martani. 2014. "Analisis terhadap Agresivitas Pajak, Agresivitas Pelaporan Keuangan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia". Simposium Nasional Akuntansi 17, Lombok.
- Rusydi, Muhammad Khoiru, Siddarta Utama and Chaerul D.Djakman. 2017. "Pajak dan Konservatisme Akuntansi." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8(1): 216-226. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7050>.
- Sartika, Mimi. 2015. "Analisis Perbedaan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan Final dan Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan Tidak Final." *JOM Fekon* Vol. 2 (1): 1–15.
- Singgih, Santoso. 2016. *Panduan Lengkap SPSS Versi 23*. Jakarta : PT. Gramedia.

- Suryana, Anandita Budi. 2013. "Penghindaran Pajak Perusahaan Global di Dunia." Diakses 18 Februari. <http://www.pajak.go.id/content/penghindaran-pajak-perusahaan-global-di-dunia>
- Tampubolon, Mardohar Tua and Ely Kartikaningdyah. 2016. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap *Book Tax Differences*." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 4(1): 52-59.
- Tarigan, Hengky Robet M. 2016. "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2014)." *Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia* no. 2004.
- Tiaras, Irvan, and Henryanto Wijaya. 2015. "Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak." *Jurnal Akuntansi XIX* (3): 380–97.
- Wang, Liangliang. 2015. "Tax Enforcement, Corporate Tax Aggressiveness, and Cash Holdings." *China Finance Review International* 5 (4): 339–370. <https://doi.org/10.1108/CFRI-12-2014-0099>.
- Wijayanti, Ajeng, Anita Wijayanti dan Yuli Chomsatu. 2016. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis* 1(1): 60-78.
- Wijayanti, Provita, and Suci Rismawati. 2016. "The Impact Of Financial Condition and Corporate Social Responsibility To The Aggressiveness Of Company Tax In Jakarta Islamic Index." *International Journal of Organization Innovation* 9 (1): 111–125.
- Saputra Ardi. 2017. "Analisis Pengaruh *Corporate Governance*, Agresivitas Pelaporan Keuangan dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate dan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)." *E-Jurnal Universitas Bung Hatta* Vol.11 (1).
- Suryowati, Estu. 2016. "Apa Perbedaan Praktik Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak." Kompas.com.
<http://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/14/083000826/Apa.Perbedaan.Praktik.Penghindaran.Pajak.dan.Penggelapan.Pajak>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan.
- Yunistiyani, Vina and Afrizal Tahar. 2017. "Corporate Social Responsibility Dan Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 2 (1): 1–31.

LAMPIRAN 1

Daftar Sampel Perusahaan Perbankan

No	KODE	NAMA EMITEN
1	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk
2	ARTO	Bank Artos Indonesia Tbk
3	BABP	Bank MNC Internasional Tbk
4	BACA	Bank Capital Indonesia Tbk
5	BBCA	Bank Central Asia Tbk
6	BBKP	Bank Bukopin Tbk
7	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk
8	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
9	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan Tbk
10	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
11	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
12	BCIC	Bank J Trust Indonesia Tbk
13	BDI	Bank Danamon Indonesia Tbk
14	BEKS	Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
15	BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
16	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
17	BKSW	Bank QNB Indonesia Tbk
18	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
19	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk
20	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk
21	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk
22	BNLI	Bank Permata Tbk
23	BSIM	Bank Sinarmas Tbk
24	BSWD	Bank Of India Indonesia Tbk
25	BTPN	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
26	BVIC	Bank Victoria International Tbk
27	INPC	Bank Artha Graha Internasional Tbk
28	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk
29	MCOR	Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
30	MEGA	Bank Mega Tbk
31	NISP	Bank OCBC NISP Tbk
32	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk
33	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk

LAMPIRAN 2

Data Agresivitas Pajak 2012-2016

NO	KODE	Agresivitas Pajak (BTD)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	AGRO	-0,0055	-0,0010	0,0001	-0,0003	-0,0001
2	ARTO	0,0009	-0,0002	-0,0018	-0,0019	-0,0489
3	BABP	0,0008	-0,0081	-0,0074	0,0009	-0,0002
4	BACA	0,0005	-0,0018	0,0010	0,0006	-0,0005
5	BBCA	0,0048	0,0039	0,0046	0,0043	0,0051
6	BBKP	0,0024	0,0036	0,0008	0,0021	0,0030
7	BBMD	-3,9510	-3,9481	-3,9636	-3,9657	-0,0009
8	BBNI	0,0084	0,0066	0,0067	-0,0014	0,0041
9	BBNP	-0,0006	-0,0003	-0,0006	-0,0004	-0,0005
10	BBRI	0,0106	0,0079	0,0084	0,0046	0,0008
11	BBTN	0,0026	-0,0013	-0,0013	-0,0013	0,0023
12	BCIC	0,0095	-0,0844	-0,0528	-0,0494	-0,0447
13	BDI	-0,0319	-0,0353	-0,0319	-0,0356	-0,0450
14	BEKS	0,0089	0,0114	-0,0164	-0,0645	-0,0972
15	BJBR	0,0071	0,0029	0,0019	0,0028	0,0006
16	BJTM	0,0049	-0,0053	-0,0197	-0,0118	-0,0141
17	BKSW	-0,0085	0,0005	0,0038	0,0052	-0,0355
18	BMRI	0,0031	0,0040	0,0056	0,0046	-0,0017
19	BNBA	0,0019	-0,0003	-0,0001	-0,0015	-0,0020
20	BNGA	-0,0306	-0,0269	-0,0125	-0,0031	-0,0108
21	BNII	-0,0205	-0,0194	-0,0090	0,0003	-0,0189
22	BNLI	-0,0004	0,0023	0,0039	-0,0072	-0,0522
23	BSIM	0,0083	0,0067	0,0049	0,0041	0,0008
24	BSWD	-0,0015	-0,0012	-0,0007	-0,0078	0,1335
25	BTPN	0,0074	-0,0027	-0,0014	-0,0030	-0,0022
26	BVIC	0,0038	0,0025	-0,0005	-0,0028	0,0001
27	INPC	0,0062	-0,0001	-0,0045	0,0005	0,0013
28	MAYA	-0,0004	-0,0010	0,0011	-0,0006	0,0064
29	MCOR	0,0012	0,0027	-0,0007	-0,0024	-0,0020
30	MEGA	0,0099	0,0045	0,0055	0,0083	0,0043
31	NISP	-0,0016	-0,0009	0,0000	-0,0015	-0,0055
32	PNBN	-0,0017	-0,0014	-0,0008	-0,0030	-0,0015
33	SDRA	0,0011	0,0014	0,0022	0,0008	0,0015

LAMPIRAN 3

Data Kepemilikan Manajerial 2012-2016

NO	KODE	Kepemilikan Manajerial (KM)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	AGRO	0,0000	0,0074	0,0086	0,0048	0,0020
2	ARTO	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	BABP	0,0000	0,0000	0,5530	0,4345	1,4083
4	BACA	21,8562	28,5200	28,5200	8,0427	12,6733
5	BBCA	0,0016	0,0026	0,0024	0,0024	0,0020
6	BBKP	0,0024	0,0017	0,0015	0,0002	0,0002
7	BBMD	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0002
8	BBNI	0,0000	0,0000	0,0020	0,0002	0,0000
9	BBNP	0,0000	0,0000	0,0000	0,0178	0,0177
10	BBRI	0,0038	0,0036	0,0034	0,0031	0,0018
11	BBTN	0,0010	0,0144	0,0118	0,0105	0,0062
12	BCIC	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13	BDI	0,0027	0,0027	0,0018	0,0017	0,0000
14	BEKS	0,0003	0,0000	0,0000	0,0020	0,0000
15	BJBR	0,0036	0,0029	0,0025	0,0021	0,0002
16	BJTM	0,0000	0,0020	0,0010	0,0000	0,0013
17	BKSW	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
18	BMRI	0,0056	0,0027	0,0006	0,0000	0,0000
19	BNBA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
20	BNGA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
21	BNII	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
22	BNLI	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
23	BSIM	0,0003	0,0003	0,0003	0,0004	0,0003
24	BSWD	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161	0,0161
25	BTPN	0,0085	0,0085	0,0080	0,0064	0,0065
26	BVIC	0,1335	0,1330	0,1235	0,1235	0,1448
27	INPC	0,0525	0,0344	0,0344	0,0344	0,0285
28	MAYA	0,0094	0,0083	0,0083	0,0067	0,0459
29	MCOR	0,0133	0,0087	0,0087	0,0079	0,0294
30	MEGA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
31	NISP	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
32	PNBN	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
33	SDRA	0,0054	0,0052	0,0023	0,0023	0,0018

LAMPIRAN 4

Data Komisaris Independen 2012-2016

NO	KODE	Komisaris Independen (KI)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	AGRO	0,6000	0,6000	0,6000	0,5000	0,5000
2	ARTO	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667
3	BABP	1,0000	1,0000	0,6667	0,6667	0,6667
4	BACA	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667
5	BBCA	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000
6	BBKP	0,6000	0,6667	0,5714	0,5000	0,5714
7	BBMD	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
8	BBNI	0,5714	0,5714	0,5000	0,6250	0,6250
9	BBNP	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
10	BBRI	0,3750	0,6250	0,7500	0,6250	0,5556
11	BBTN	0,5000	0,5000	0,5000	0,5714	0,5714
12	BCIC	0,6667	0,6667	0,5000	0,7500	0,5000
13	BDI	0,5000	0,5000	0,5000	0,5714	0,5000
14	BEKS	0,7500	0,6667	0,5000	0,5000	0,5000
15	BJBR	0,6667	0,8000	0,5714	0,7500	0,6000
16	BJTM	0,5000	0,5000	0,5000	0,4000	0,4000
17	BKSW	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
18	BMRI	0,5714	0,5714	0,5714	0,5000	0,5000
19	BNBA	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
20	BNGA	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
21	BNII	0,5714	0,0000	0,5000	0,5000	0,5000
22	BNLI	0,5556	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
23	BSIM	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667
24	BSWD	0,6000	0,6000	0,7143	0,6000	0,6000
25	BTPN	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,6000
26	BVIC	0,7500	0,7500	0,7500	0,5000	0,5000
27	INPC	0,6667	0,6667	0,5000	0,5000	0,6000
28	MAYA	0,5000	0,6000	0,6000	0,4000	0,4000
29	MCOR	0,5000	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667
30	MEGA	0,6667	0,5000	0,6667	0,5000	0,5000
31	NISP	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
32	PNBN	0,5000	0,5000	0,6000	0,6667	0,5000
33	SDRA	0,6667	0,6667	0,7500	0,7500	0,7500

LAMPIRAN 5

Data Komite Audit 2012-2016

NO	KODE	Komite Audit (KA)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	AGRO	3	3	3	3	3
2	ARTO	3	3	3	3	3
3	BABP	3	3	4	4	4
4	BACA	3	3	3	3	3
5	BBCA	3	3	3	3	3
6	BBKP	4	4	4	5	5
7	BBMD	4	4	4	3	3
8	BBNI	4	3	3	4	3
9	BBNP	3	3	3	3	3
10	BBRI	8	8	6	4	6
11	BBTN	3	5	4	5	7
12	BCIC	4	4	6	4	7
13	BDI	6	6	5	5	5
14	BEKS	3	3	3	3	4
15	BJBR	5	6	6	5	5
16	BJTM	3	3	3	3	3
17	BKSW	2	3	3	3	3
18	BMRI	6	6	6	5	6
19	BNBA	3	3	3	3	3
20	BNGA	6	6	6	6	4
21	BNII	5	4	4	4	4
22	BNLI	4	4	3	3	4
23	BSIM	5	5	4	3	3
24	BSWD	3	3	3	3	3
25	BTPN	5	5	4	3	4
26	BVIC	3	4	4	5	5
27	INPC	6	6	6	6	4
28	MAYA	3	3	3	3	3
29	MCOR	3	3	3	3	3
30	MEGA	3	3	3	3	3
31	NISP	4	4	4	4	3
32	PNBN	4	4	4	4	4
33	SDRA	3	3	3	5	5

LAMPIRAN 6

Data Konservatisme Akuntansi 2012-2016

NO	KODE	Koservatisme Akuntansi (Kak)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	AGRO	1	1	0	0	0
2	ARTO	1	0	0	1	1
3	BABP	0	0	0	0	1
4	BACA	1	0	0	0	1
5	BBCA	0	1	0	0	0
6	BBKP	0	1	0	1	0
7	BBMD	1	1	0	1	1
8	BBNI	1	1	1	0	0
9	BBNP	0	0	1	1	0
10	BBRI	1	1	0	0	1
11	BBTN	0	1	1	1	0
12	BCIC	1	0	0	1	0
13	BDI	1	1	0	0	1
14	BEKS	0	1	0	1	1
15	BJBR	0	1	0	0	0
16	BJTM	1	0	0	0	1
17	BKSW	0	0	0	1	0
18	BMRI	1	1	0	1	0
19	BNBA	1	1	0	0	0
20	BNGA	0	1	1	0	0
21	BNII	0	1	1	0	1
22	BNLI	0	1	0	0	0
23	BSIM	1	1	0	0	0
24	BSWD	0	0	0	1	1
25	BTPN	0	1	0	0	0
26	BVIC	0	1	0	0	0
27	INPC	1	1	0	0	1
28	MAYA	0	1	0	0	1
29	MCOR	1	1	0	0	1
30	MEGA	1	0	1	1	0
31	NISP	0	1	1	1	0
32	PNBN	1	0	1	0	1
33	SDRA	0	1	1	0	1

LAMPIRAN 7

Data Agresivitas Pelaporan Keuangan 2012-2016

NO	KODE	Agresivitas Pelaporan Keuangan (APK)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	AGRO	1,1983	0,0306	-1,0121	-0,0121	0,3380
2	ARTO	-4,5578	0,0243	-0,9401	0,0055	-0,7856
3	BABP	-10,6508	-0,0003	-0,4794	-0,0057	0,1028
4	BACA	-16,4554	0,0205	-0,7270	-0,0083	0,0679
5	BBCA	-22,4398	0,0169	-0,3670	-0,0042	0,0600
6	BBKP	-28,4173	0,0219	-0,5016	-0,0078	0,0902
7	BBMD	-34,3742	0,0177	-0,3611	-0,0037	-0,1223
8	BBNI	-40,3742	0,0155	-0,3627	-0,0061	0,1822
9	BBNP	-46,2881	0,0302	0,1862	0,0016	-0,1896
10	BBRI	-52,3377	0,0210	-0,5131	-0,0050	0,1190
11	BBTN	-58,2796	0,0228	-0,5967	-0,0091	0,2064
12	BCIC	-64,2424	0,0046	1,1438	-0,0090	0,1610
13	BDI	-70,2352	0,0083	-0,0910	0,0031	-0,0528
14	BEKS	-75,3075	0,0213	0,0774	0,0151	-0,2196
15	BJBR	-82,1841	0,0262	-0,3314	-0,0053	0,1298
16	BJTM	-88,2101	0,0268	-0,6290	-0,0029	0,0303
17	BKSW	-94,1271	0,0461	-3,2554	-0,0161	-0,1775
18	BMRI	-100,1584	0,0222	-0,3994	-0,0042	0,0857
19	BNBA	-106,0928	0,0302	-0,9119	-0,0087	0,0352
20	BNGA	-112,1127	0,0101	-0,4138	0,0001	0,0112
21	BNII	-118,0690	0,0175	-0,1457	-0,0023	0,0287
22	BNLI	-124,0444	0,0255	-0,2424	0,0001	-0,2397
23	BSIM	-129,9410	0,0074	-0,9905	-0,0085	0,0893
24	BSWD	-136,0189	0,0413	-0,8436	-0,0031	-0,2771
25	BTPN	-141,8283	0,0422	-0,4400	-0,0052	0,0781
26	BVIC	-147,9300	0,0447	-0,3182	-0,0016	0,0861
27	INPC	-153,9640	0,0061	-0,4100	-0,0002	0,0351
28	MAYA	-158,3105	0,0424	-1,8186	-0,0132	0,3707
29	MCOR	-165,8901	0,0073	-0,9377	-0,0021	0,1287
30	MEGA	-171,9312	-0,0147	-0,2690	0,0013	-0,0812
31	NISP	-177,8561	0,0191	-0,2260	-0,0097	0,0719
32	PNBN	-183,8676	0,0069	-0,3139	-0,0020	0,0555
33	SDRA	-189,6295	0,0405	-3,2858	-0,0088	0,1731

LAMPIRAN 8

Data Profitabilitas 2012-2016

NO	KODE	Profitabilitas (ROE)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	AGRO	0,0888	0,0627	0,0686	0,0595	0,0532
2	ARTO	0,0040	0,0198	0,0099	-0,0029	-0,2263
3	BABP	0,0015	-0,1070	-0,0442	0,0048	0,0050
4	BACA	0,0725	0,0778	0,0765	0,0862	0,0711
5	BBCA	0,2261	0,2232	0,2126	0,2018	0,1835
6	BBKP	0,1671	0,1504	0,1065	0,1280	0,1140
7	BBMD	0,1457	0,1597	0,1112	0,1064	0,0668
8	BBNI	0,1621	0,1903	0,1833	0,1129	0,1309
9	BBNP	0,1292	0,1000	0,0848	0,0559	0,0068
10	BBRI	0,2884	0,2697	0,2486	0,2252	0,1791
11	BBTN	0,1327	0,1352	0,0914	0,1335	0,1369
12	BCIC	0,1170	-0,8262	-0,6493	-0,6773	-0,5311
13	BDI	0,1445	0,1331	0,0818	0,0728	0,0777
14	BEKS	0,0716	0,1341	-0,1873	-1,0660	-0,4686
15	BJBR	0,1997	0,2059	0,1590	0,1790	0,1197
16	BJTM	0,1321	0,1441	0,1554	0,1405	0,1426
17	BKSW	-0,0342	0,0022	0,0530	0,0644	-0,1870
18	BMRI	0,3482	0,3158	0,2790	0,2371	0,0974
19	BNBA	0,1093	0,0996	0,0861	0,0462	0,0607
20	BNGA	0,1876	0,1666	0,0824	0,0010	0,0609
21	BNII	0,1275	0,1286	0,0493	0,0738	0,1021
22	BNLI	0,1095	0,1222	0,0928	0,0131	-0,3361
23	BSIM	0,1248	0,0803	0,0490	0,0505	0,0828
24	BSWD	0,1471	0,1792	0,1894	-0,0401	-0,4557
25	BTPN	0,2559	0,2151	0,1582	0,1291	0,1184
26	BVIC	0,1399	0,1597	0,0601	0,0445	0,0382
27	INPC	0,0688	0,0865	0,0407	0,0258	0,0165
28	MAYA	0,1426	0,1597	0,1527	0,1422	0,1163
29	MCOR	0,1245	0,0756	0,0433	0,0477	0,0093
30	MEGA	0,2199	0,0858	0,0861	0,0914	0,0944
31	NISP	0,1023	0,0847	0,0891	0,0915	0,0918
32	PBNB	0,1291	0,1323	0,1231	0,0553	0,0796
33	SDRA	0,2209	0,2140	0,0354	0,0641	0,0702

LAMPIRAN 9

Hasil *Generalized Linear Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.008856	0.004496	-1.969591	0.0489
KM	0.000112	5.12E-05	2.182572	0.0291
KI	-0.006303	0.008745	-0.720741	0.4711
KA	0.001425	0.000138	10.31917	0.0000
KAK	0.005774	0.002172	2.657981	0.0079
APK	-0.023505	0.011514	-2.041387	0.0412
ROE	0.053035	0.005260	10.08278	0.0000
Weighted Statistics				
Mean dependent var	-0.000255	S.D. dependent var	0.185539	
Sum squared resid	0.002409	Log likelihood	177.7765	
Akaike info criterion	-6.697117	Schwarz criterion	-6.431965	
Hannan-Quinn criter.	-6.595794	Deviance	0.000129	
Deviance statistic	2.93E-06	Restr. deviance	0.000949	
LR statistic	280.2521	Prob(LR statistic)	0.000000	
Pearson SSR	0.000129	Pearson statistic	2.93E-06	
Dispersion	2.93E-06			
Unweighted Statistics				
Mean dependent var	-0.003258	S.D. dependent var	0.013741	